

**IMPLEMENTASI *COUNTRY STRATEGY PLAN* OLEH WFP (WORLD
FOOD PROGRAMME) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN
KERAWANAN PANGAN DI NIGERIA TAHUN 2020-2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

DILLA MUSTIKA AYU

21323105

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

**IMPLEMENTASI *COUNTRY STRATEGY PLAN* OLEH WFP (WORLD
FOOD PROGRAMME) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN
KERAWANAN PANGAN DI NIGERIA TAHUN 2020- 2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

DILLA MUSTIKA AYU

21323105

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI *COUNTRY STRATEGY PLAN* OLEH WFP (WORLD FOOD PROGRAMME) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN KERAWANAN PANGAN DI NIGERIA TAHUN 2020- 2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

20 Agustus 2025

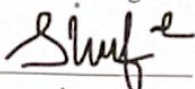
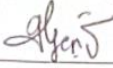

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Dewan Penguji

1. Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.
2. Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 8 Agustus 2025



Dilla Mustika Ayu

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	15
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	15
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	16
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB II DINAMIKA KERAWANAN PANGAN DI NIGERIA: UPAYA DOEMSTIK, PERAN WFP, DAN FAKTOR PERNYEBAB TAHUN 2020- 2024	18
2.1 Upaya Pemerintah Nigeria dalam Menangani Kerawanan Pangan	18
2.2 Kehadiran WFP di Nigeria: Mandat dan Landasan Operasional	20
2.3 Kesepakatan dan Struktur Organisasi World Food Programme	21

2.4 Peran World Food Programme di Nigeria tahun 2020-2024.....	22
2.5 Permasalahan Kerawanan pangan di Nigeria tahun 2020-2024.....	24
2.5.1 <i>Pandemi COVID-19 Memperburuk Kerawanan Pangan di Nigeria....</i>	24
2.5.2 <i>Krisis Ekonomi dan Inflasi Menyebabkan Kerawanan Pangan di Nigeria</i>	27
2.5.3 <i>Konflik Besenjata dan Ketidakamanan Menjadi Faktor Terjadinya Kerawanan Pangan di Nigeria.....</i>	29
2.5.4 <i>Faktor Bencana Alam dan Perubahan Iklim terhadap Kerawanan Pangan di Nigeria.....</i>	32
BAB III IMPLEMENTASI <i>COUNTRY STRATEGY PLAN</i> OLEH WFP DALAM MENANGANI KERAWANAN PANGAN DI NIGERIA TAHUN 2020-2024 MELALUI PENDEKATAN MANAJERIAL	36
3.1 Pendekatan Normatif: Legitimasi dan Mandat WFP	37
3.2 Pendekatan Manajerial dalam Implementasi CSP oleh World Food Programme di Nigeria.....	37
3.2.1 <i>Monitoring</i>	38
3.2.1.1 <i>Monitoring Berdasarkan State Reporting (Laporan Negara)</i>	38
3.2.1.2 <i>Monitoring Berdasarkan Expert Committees (Komite Ahli)</i>	41
3.2.1.3 <i>Monitoring Berdasarkan Inspection (Inspeksi).....</i>	42
3.2.1.4 <i>Monitoring Berdasarkan NGO Reports (Laporan LSM).....</i>	45
3.2.2 <i>Capacity Building and Problem Solving</i>	47
3.2.2.1 <i>Expert Advice (Saran Ahli)</i>	47
3.2.2.2 <i>Rule Interpretation (Interpretasi Aturan)</i>	49
3.2.2.3 <i>Financial Assistance (Bantuan Keuangan)</i>	50
3.2.2.4 <i>Technical Assistance (Bantuan Teknis)</i>	52
3.3 Penilaian dari Organisasi lain dan Lembaga Penelitian	54
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rekomendasi.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendekatan Implementasi Kebijakan	10
Tabel 2.1 Permasalahan Kerawanan Pangan di Nigeria yang Disebabkan oleh Pandemi COVID-19.....	26
Tabel 2.2 Kerawanan Pangan di Nigeria Akibat Krisis Ekonomi dan Inflasi.....	29
Tabel 2.3 Kerawanan Pangan di Nigeria Akibat Konflik Besenjata dan Ketidakamanan	32
Tabel 2.4 Kerawanan Pangan di Nigeria akibat Faktor Bencana Alam dan Perubahan Iklim.....	35

DAFTAR SINGKATAN

ACLED	: Armed Conflict Location & Event Data Project
ABP	: Anchor Borrower Programme
AI	: Artificial Intelligence
ATA	: Agricultural Transformation Agenda
CBT	: Cash Based Transfers
CSP	: Country Strategic Plan
D4D	: Data for Decision
FCDO	: Foreign, Commonwealth & Development Office
FAO	: Food and Agriculture Organization
FMARD	: Federal Ministry of Agriculture and Rural Development
FMHDS	: Federal Ministry of Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development
FSIN	: Food Security Information Network
GRFC	: Global Report on Food Crises
IFPRI	: International Food Policy Research Institute
IMF	: International Monetary Fund
IPC	: Integrated Food Security Phase Classification
ISWAP	: Islamic State West Africa Province
NASSCO	: National Social Safety Nets Coordinating Office
mVAM	: Mobile Vulnerability Analysis and Mapping
NBS	: National Bureau of Statistics
NEMA	: National Emergency Management Agency
NIHSA	: Nigerian Hydrological Services Agency
NiMet	: Nigerian Meteorological Agency
NSAG	: Non-State Armed Groups
OCHA	: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
PDM	: Post Distribution Monitoring
SEMAs	: State Emergency Management Agencies
TPM	: Third Party Monitoring
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
USDA	: US Department of Agriculture
USAID	: United States Agency for International Development
WFP	: World Food Programme

ABSTRAK

Kerawanan pangan di Nigeria semakin meningkat akibat pandemi COVID-19, konflik bersenjata, krisis ekonomi, lemahnya infrastruktur, dan perubahan iklim. Penelitian ini menganalisis implementasi *Country Strategic Plan* (CSP) oleh World Food Programme (WFP) periode 2020–2024. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis laporan resmi WFP dan literatur akademik, hasil penelitian menunjukkan bahwa WFP melaksanakan strategi penting, antara lain bantuan pangan darurat, program gizi ibu dan anak, penguatan kapasitas institusional, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan ketahanan pangan. WFP juga membangun kemitraan lintas sektor guna memperkuat efektivitas program. Namun, implementasi CSP menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendanaan, hambatan akses di wilayah konflik, inflasi pangan, dan dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Secara keseluruhan, CSP berkontribusi signifikan dalam mengurangi kerentanan pangan dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di Nigeria, meskipun efektivitas jangka panjangnya bergantung pada dukungan internasional, reformasi kebijakan nasional, dan kolaborasi lintas sektor.

Kata Kunci: Bantuan Kemanusiaan, Kerawanan Pangan, Ketahanan Pangan, Nigeria, WFP.

ABSTRACT

Food insecurity in Nigeria has intensified due to the COVID-19 pandemic, armed conflict, economic crisis, weak infrastructure, and climate change. This study analyzes the implementation of the Country Strategic Plan (CSP) by the World Food Programme (WFP) for the 2020–2024 period. Using a qualitative descriptive-analytical approach based on WFP reports and academic literature, the findings reveal that WFP implemented key strategies including emergency food assistance, maternal and child nutrition programs, institutional capacity building, and the use of digital technologies for food security monitoring. WFP also fostered cross-sector partnerships to enhance program effectiveness. However, CSP implementation faced challenges such as funding limitations, restricted access in conflict areas, high food inflation, and climate impacts on agriculture. Overall, the CSP made significant contributions to reducing vulnerability and promoting sustainable food security in Nigeria, though its long-term effectiveness depends on consistent international support, national policy reforms, and cross-sector collaboration.

Keywords: Food Insecurity, Food Security, Humanitarian Aid, Nigeria, WFP.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan paling mendesak yang dihadapi banyak negara di dunia saat ini adalah kerawanan pangan. kerawanan pangan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Deklarasi ini dibuat pada tahun 1996 dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia (Summit, 1996). Masalah mendesak ini sudah dirasakan oleh Nigeria sejak lama. Keberadaan WFP sebagai organisasi internasional telah diatur dalam Perjanjian Pembentukan World Food Programme (UNGA Res.1714 (XVI) dan FAO Conf.Res 1/16) yang disahkan pada tahun 1961 (United Nations., 1961). Resolusi ini memberikan mandat kepada WFP untuk menyediakan bantuan pangan darurat dan mendukung ketahanan pangan di negara-negara yang mengalami krisis, dalam hal ini Nigeria yang menjadi fokusnya, Resolusi ini menjadi acuan bagi WFP dalam beroperasi dan berkolaborasi dengan pemerintah Nigeria melalui Implementasi *Country Strategy Plan* (CSP) dalam menangani permasalahan kerawanan pangan yang semakin meningkat.

WFP telah aktif beroperasi di Nigeria jauh sebelum tahun 2020, namun aktivitasnya lebih intensif dan terfokus pada tahun 2020-2024 sebagai respons terhadap eskalasi kerawanan pangan yang signifikan. Sebab di tahun-tahun sebelumnya krisis kerawanan pangan di Nigeria masih sebatas di wilayah timur laut

Nigeria akibat konflik Boko Haram, tidak tersebar luas hingga mencapai skala nasional seperti yang terjadi saat pandemi dan pasca pandemi COVID-19, dengan rata-rata 7,1-8,5 juta orang mengalami kerawanan pangan akut, dan juga 80% kasusnya terkonsentrasi di tiga wilayah bagian timur laut Nigeria.

Tahun 2020 WFP meluncurkan implementasi CSP 2019-2022 yang telah direvisi menjadi hingga 2024 untuk merespon dampak pandemic COVID-19. WFP memulai program pemetaan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi melalui system VAM (*Analysis and Mapping*), kemudian mengintegrasikan data dari berbagai sumber guna memastikan distribusi bantuan yang lebih terfokus. Aktivitas WFP di tahun 2020 juga mencakup pengiriman ransum bantuan darurat kepada 1,2 juta pengungsi dan upaya pengurangan malnutrisi akut terhadap anak-anak (WFP, 2020).

Tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 jumlah penduduk Nigeria yang mengalami kerawanan pangan akut meningkat secara signifikan sebanyak 9,8 juta (FSIN, 2020). Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah berdampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat, terutama dalam sektor informal, sehingga meningkatkan kebutuhan akan bantuan pangan darurat. Kelompok rentan seperti lansia, individu dengan penyakit kronis, penyandang disabilitas, perempuan, rumah tangga dengan anak, pemuda pengangguran, dan pengungsi internal menjadi yang paling terdampak (WFP Annual Report, 2020).

Pada tahun 2021, jumlah orang yang mengalami kerawanan pangan akut di Nigeria meningkat menjadi 12,8 juta orang, ini menunjukkan kenaikan 30% dari tahun sebelumnya (Food and Agriculture Organization and Cadre Harmonisé,

2021). World Food Programme (WFP) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Nigeria dalam menangani krisis pangan di wilayah timur laut (Borno, Adamawa, dan Yobe) serta menguji program bantuan di barat laut (Katsina dan Zamfara). Namun, keterbatasan sumber daya memaksa World Food Programme (WFP) mengurangi jumlah penerima bantuan dari 1,9 juta menjadi 1,1 juta, serta menurunkan jatah pangan menjadi 70% saja (WFP, 2021a).

Pada tahun 2022, jumlah individu yang mengalami kerawanan pangan di Nigeria mencapai 17 juta jiwa, yang mana ini meningkat menjadi 25 juta jiwa di pertengahan tahun 2023 (UNICEF, 2023). Faktor - faktor utama yang berkontribusi terhadap krisis ini mencakup meningkatkannya pengangguran, kemiskinan, inflasi, konflik bersenjata, serta dampak perubahan iklim yang memperparah frekuensi bencana alam seperti banjir. Pada tahun 2022, banjir menghancurkan 675.000 hektar lahan pertanian, hal ini mengancam produksi pangan nasional. Banjir yang dahsyat tidak hanya menghancurkan tanaman dan panen, tetapi juga hewan ternak, unggas, perikanan, dan peralatan pertanian bagi para petani, yang sebagian besar adalah petani kecil. Sangatlah penting untuk mempertimbangkan dampak kemiskinan dan pengangguran terhadap kemampuan individu, dan akibatnya, kemampuan mereka untuk mendapatkan rezeki (CARE International, 2023).

Selain itu, ketidakamanan yang meningkatkan akibat serangan kelompok bersenjata non-negara (NSAG) yaitu Boko Haram memperburuk kerawanan pangan ini. Serangan terhadap petani dan pemerasan oleh kelompok bersenjata di timur laut dan barat laut pada Oktober 2023 semakin menghambat produksi pertanian dan distribusi pangan. Ketidakstabilan ini, ditambah dengan musim

kemarau yang ekstrem dan inflasi yang melonjak mempuruk kondisi ketahanan pangan di Nigeria (WFP Nigeria, 2023). Di Nigeria sendiri, inflasi pangan mencapai 30,6% antara Agustus dan September 2023, menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan memperburuk akses pangan ke masyarakat (Jung, 2023).

Pada tahun 2024, krisis ketidakstabilan ekonomi menyebabkan harga pangan melonjak hingga 53% dibandingkan rata-rata lima tahun sebelumnya, ini memperburuk krisis pangan nasional di Nigeria (World Food Programme Nigeria, 2024).. Faktor lainnya ialah perubahan iklim yang ekstrim akibat degradasi lahan, terbatasnya akses air dan lahan pertanian, serta dampak iklim yang menyebabkan Nigeria kehilangan 100.00 hektar lahan setiap tahunnya akibat desertifikasi dan bencana alam dan diperburuk pula oleh pandemi COVID-19 serta perang di Ukraina tahun 2024 (WFP, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi kebijakan nasional yang komprehensif guna menangani kerawanan pangan, kemiskinan, pengangguran dan perubahan iklim secara simultan. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi internasional sangat krusial untuk memastikan akses masyarakat Nigeria terhadap pangan yang cukup dan bergizi (Cadre Harmonise, 2022). Implementasi CSP oleh World Food Programme sangat penting dalam memberikan bantuan dan mendukung ketahanan pangan melalui *outcome* yang mencakup pada pemulihan ketahanan pangan, menyelamatkan nyawa, memperkuat kapasitas nasional, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan efisiensi operasi kemanusiaan. Upaya ini perlu didukung oleh reformasi kebijakan

yang menyeluruh serta kolaborasi erat antara pemerintah dan organisasi internasional untuk memastikan akses pangan yang cukup dan bergizi bagi seluruh masyarakat Nigeria. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana implementasi *Country Strategy Plan* oleh World Food Programme (WFP) dalam menangani permasalahan kerawanan pangan yang terjadi di Nigeria selama periode 2020 hingga 2024.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana implementasi *Country Strategy Plan* oleh World Food Programme dalam menangani permasalahan kerawanan pangan di Nigeria tahun 2020-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Country Strategy Plan* oleh World Food Programme dalam menangani permasalahan kerawanan pangan di Nigeria tahun 2020–2024, dengan fokus pada strategi, mekanisme implementasi, dan efektivitas program.

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini, dibatasi Studi ini terbatas pada beberapa aspek, dengan fokus pada analisis implementasi *Country Strategic Plan* oleh World Food Programme (WFP) di Nigeria. Dari segi waktu, studi ini mencakup periode 2020 hingga 2024, dengan fokus khusus pada implementasi rencana CSP dari 2019 hingga 2022, yang diperpanjang hingga 2024. Periode ini dipilih karena menandai

pergeseran signifikan dalam respons WFP terhadap krisis ketidakamanan pangan, yang berkembang dari krisis regional menjadi krisis nasional akibat pandemi COVID-19. Subjek utama studi ini adalah WFP sebagai pelaksana CSP dan pemerintah Nigeria juga ikut berkontribusi. Ruang lingkup studi mencakup implementasi lima hasil strategis CSP, mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan, sistem pemantauan dan evaluasi WFP, serta dampak program dalam mengurangi ketidakamanan pangan di Nigeria. Batasan ini, diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai implementasi WFP dalam memperkuat ketahanan pangan di Nigeria.

1.5 Tinjauan Pustaka

Peneliti terdahulu telah melakukan berbagai penelitian dan kajian terhadap organisasi internasional. Dari sini peneliti ingin memfokuskan pada implementasi organisasi internasional terutama mengenai World Food Programme (WFP) di Nigeria. Dengan adanya penelitian dan kajian sebelum sebelumnya maka ditemukan adanya peran WFP yang memberi keuntungan bagi pihak yang membutuhkan dan tentunya organisasi internasional. Selain itu penelitian ini melihat sebab dan akibat dari kerawanan pangan yang terjadi Nigeria dengan melihat peneliti terdahulu yang membahas permasalahan apa saja yang terjadi di Nigeria. Berikut beberapa penelitian yang digunakan penulis sebagai referensi.

Tinjauan pertama dalam artikel jurnal "*Nigeria's Agriculture and Food Security Challenges*" yang ditulis oleh Chinedum Nwajiuba membahas tentang hambatan ketahanan pangan yang akan disampaikan oleh *Agricultural*

Transformation Agenda (ATA) dari gerakan lingkungan hidup kepada pemerintah federal Nigeria. Tantangan terhadap demokrasi, ekonomi, dan perubahan iklim yang semuanya dapat memberikan pengaruh besar terhadap politik, ini hal yang dipaparkan di dalam jurnal tersebut. Lalu, terdapat 162 juta orang yang tinggal di Nigeria pada tahun 2011, dan pada tahun 2050, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 230-430 juta. Potensi ketahanan pangan secara langsung terkait dengan peningkatan populasi yang besar. Selain itu, jumlah orang yang tinggal di kota-kota Nigeria diprediksi meningkat 51% per tahun, yang akan menurunkan jumlah pertanian yang diproduksi di Semenanjung Nigeria. Perubahan iklim juga memiliki faktor bahaya yang signifikan. Produksi petani akan menurun sebagai akibat dari perubahan iklim ini, yang juga akan memperburuk praktik pertanian. Dalam jurnal ini gagasan "*green agriculture*" disarankan untuk pembangunan Nigeria. Memprioritaskan pertanian akan menghasilkan penggunaan sumber daya yang tidak merata dan kesejahteraan sosial ekonomi yang efektif, terutama bagi para petani Nigeria. Sumber energi terbaru, seperti tenaga air dan biomassa skala kecil, harus digunakan bersama dengan teknik industri yang hemat energi, konversi limbah, dan pengurangan jejak karbon. Dalam hal ini pertanian sebagai sumber utama di Nigeria perlu dikembangkan agar tidak adanya kerawanan pangan (Chinedum Nwajiuba, 2005).

Tinjauan kedua dalam artikel jurnal yang berjudul "*Peran Liputan Media Terhadap World Food Programme dalam Menangani Krisis Pangan yang Terjadi di Suriah*" oleh Moody Rizqy Syailendra Putra dan Muhammad Fadloli, menurut mereka peran WFP semakin kuat berkat sorotan media, yang membantu

membangun kesadaran global dan mendorong dukungan internasional. Ditambah WFP sendiri tidak hanya bertindak sebagai penyalur bantuan, tapi juga sebagai jembatan antara komunitas global dan korban krisis, yang mana ini memperlihatkan bahwa peran kemanusiaan tak lepas dari pengaruh media. Namun terdapat tantangan dari lapangan yaitu sulitnya mengakses wilayah terbatas, situasi keamanan yang tidak menentu dan keterbatasan dana (Syailendra Putra et al., 2024).

Tinjauan ketiga dalam artikel jurnal yang berjudul “*Peran Food and Agriculture Organization (FAO) dalam Mengatasi Kerawanan Pangan di Nigeria Tahun 2016-2018*” oleh Anggita Dewi Swastutiputri dan Siti Muslikhati. Dalam penelitian ini membahas mengenai peran FAO yang mana pada masa itu krisis pangan di Nigeria cukup parah. Peran utama FAO ialah sebagai fasilitator, yang mana membantu masyarakat Nigeria menjaga stabilitas akses terhadap pangan. FAO melakukannya melalui program pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan hasil produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Selain itu, FAO juga melakukan kerjasama dengan negara dan organisasi lainnya untuk menjamin ketersediaan pangan (Swastutiputri & Muslikhati, 2018) .

Tinjauan keempat dari pandangan dari Rizky dan Fahlan, dalam artikel jurnal yang membahas WFP dengan judul “*Peran World Food Programme (WFP) terhadap Kerawanan Pangan di Namibia*” menurutnya World Food Programme (WFP) telah membuat beberapa kemajuan dalam memerangi kerawanan pangan, tetapi kemampuan WFP untuk sepenuhnya mencampuri kebijakan Namibia secara keseluruhan masih terbatas pada pembentukan program-program bantuan teknis dan masukan. Mengenai perumusan kebijakan dan keputusan, hal ini berkaitan

dengan kedaulatan negara. Adanya penetapan kebijakan membuat tidak maksimalnya fungsi organisasi internasional dalam menangani suatu kasus, oleh karena itu belum tercapai secara maksimal peranan dari WFP sendiri (Rizky Anggia Putri, Falhan Hakiki, 2022).

Beragam studi menunjukkan bahwa efektivitas peran World Food Programme (WFP) sangat bergantung pada konteks lokal. Dari penelitian oleh Nwajiuba yang mendentifikasi tantangan struktural di Nigeria seperti perubahan iklim dan urbanisasi sebagai faktor krusial dalam krisis pangan, kemudian penelitian oleh Syailendra Putra dan Fadloli yang menekankan keberhasilan WFP berkat dukungan media internasional, sementara itu, Swastutiputri dan Muslikhati dalam penelitiannya menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam studi tentang FAO di Nigeria. Lalu di penelitian Rizly dan Falhan menyoroti ketebatasan WFP di Nimibia akibat kedaulatan kebijakan luar negeri.

Penelitian ini berfokus pada implementasi *Country Strategic Plan* (CSP) oleh WFP di Nigeria. Tidak seperti kajian-kajian terdahulu, studi ini menyoroti operasional WFP secara khusus pada periode 2020–2024, yang ditandai oleh krisis pandemi COVID-19 dan fase pemulihan pascapandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih terpadu antara pemberian bantuan langsung dengan upaya pembangunan ketahanan lokal, agar kontribusi WFP dalam mengatasi kerawanan pangan di Nigeria dapat lebih berkelanjutan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori "*International Organization and Implementation*" oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek

Penelitian ini menggunakan teori "*International Organization and Implementation*" oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek, untuk menganalisis Implementasi *Country Strategy Plan* oleh World Food Programme (WFP) dalam menangani permasalahan kerawanan pangan di Nigeria tahun 2020-2024. Dalam hal ini organisasi internasional seperti WFP memiliki pengaruh besar dalam membantu negara-negara menghadapi berbagai tantangan domestik, termasuk krisis pangan.

Dalam buku "*International Organization and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?*", implementasi organisasi internasional adalah proses mengubah perjanjian internasional menjadi kebijakan nyata, seperti melalui regulasi, undang-undang, atau pembentukan institusi (Joachim 2007, 8-13).

Terdapat tiga pendekatan utama dalam memahami proses ini:

Tabel 1.1 Pendekatan Implementasi Kebijakan

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
Resources	<ul style="list-style-type: none">• <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports• <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming	<ul style="list-style-type: none">• <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports• <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance	<ul style="list-style-type: none">• <i>Authority and legitimacy</i>

Sumber: International Organization and Implementation (Jutta Joachim, and Bob Reinalda and Bertjan Verbeek 2007)

Pendekatan *enforcement* (penegakan), menurut Joachim ialah proses penggunaan berbagai jenis insentif, hukuman, atau tekanan untuk memastikan bahwa negara-negara mematuhi kewajiban internasional mereka. Di antaranya adalah prosedur penyelesaian sengketa yang dapat mengakibatkan dampak hukum atas pelanggaran, sistem pemantauan yang ketat untuk mengawasi penerapan kebijakan, dan denda ekonomi yang dikenakan kepada negara-negara yang melanggar kesepakatan internasional. Dalam sistem internasional yang didasarkan pada gagasan kedaulatan negara, Joachim mengakui bahwa metode penegakan hukum memiliki keterbatasan yang penting. Organisasi internasional sering kali tidak memiliki kekuatan supranasional yang diperlukan untuk memaksa pemerintah yang tidak patuh, dan kerja sama negara-negara anggota dengan kekuatan politik dan ekonomi yang substansial sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum (Joachim 2007, 8-13).

Pendekatan manajerial, memberikan pilihan untuk mempromosikan implementasi yang lebih kolaboratif dan bermanfaat. Menurut Joachim, kurangnya keahlian teknis, uang, atau kemampuan lebih sering menjadi penyebab kegagalan implementasi dibandingkan dengan kedengkian atau perlawanan politik. Dalam hal ini, negara-negara anggota dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk memenuhi kewajiban internasional dengan bantuan organisasi internasional, yang bertindak sebagai fasilitator. Penyediaan bantuan teknis dan keuangan untuk mengatasi tantangan dunia nyata, transfer teknologi, dan pengetahuan yang memfasilitasi implementasi yang lebih efektif, koordinasi di antara negara-negara untuk mencegah duplikasi upaya dan memaksimalkan efisiensi, dan program peningkatan

kapasitas yang membantu negara-negara berkembang dalam menciptakan institusi yang mereka butuhkan adalah beberapa contohnya. Karena teknik-teknik manajemen ini memberikan kerangka kerja jangka panjang untuk kepatuhan yang berkelanjutan daripada hanya menegakkan kepatuhan sementara di bawah tekanan dari sumber-sumber luar, teknik-teknik ini sering kali lebih berkelanjutan (Joachim 2007, 8-13).

Pendekatan normatif, menyoroti organisasi internasional sebagai sumber otoritas moral dan kepercayaan, dengan mengandalkan pengetahuan dan legitimasi untuk mendorong negara mentaati komitmen. Hal ini menyatakan bahwa pendekatan normatif mengakui bahwa tindakan pemerintah dipengaruhi oleh norma, nilai, dan identitas mereka di samping kepedulian mereka terhadap sanksi atau perhitungan kepentingan finansial. Organisasi internasional berfungsi sebagai alat sosialisasi yang secara progresif membentuk dan mengubah cara negara memandang identitas, kepentingan, dan apa yang merupakan perilaku yang pantas dan tidak pantas dalam lingkungan global. Membangun identitas kolektif yang dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama di antara negara-negara anggota, melegitimasi praktik-praktik tertentu sebagai standar internasional yang dapat memengaruhi harapan dan perilaku negara, berinteraksi secara teratur dalam forum-forum internasional yang memungkinkan munculnya dan menyebarluaskan norma-norma baru, serta menggunakan bujukan moral untuk mengubah preferensi negara tanpa menggunakan paksaan secara terang-terangan adalah cara-cara yang digunakan untuk proses tersebut (Joachim 2007, 8-13).

Penelitian ini menggunakan pendekatan manajerial dan pendekatan normatif sebagai kerangka analisisnya. Pendekatan manajerial WFP di Nigeria menekankan pada pemantauan, pengembangan kapasitas dan pemecahan masalah melalui kolaborasi formal dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terlibat didalamnya. Kemudian pendekatan normative menjadi dasar legitimasi, didasarkan pada Resolusi A/RES/1714 (XVI) Majelis Umum PBB tanggal 19 Desember 1961, mengenai WFP dan misinya untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang terdampak krisis kemanusiaan.

Menurut Pasal XI.1, WFP memiliki hak untuk menagguhkan bantuan jika terjadi pelanggaran serius, namun selama periode 2020-2024, Nigeria tidak pernah melakukan pelanggaran dan menjadi negara prioritas karena keadaan darurat pangan (WORLD FOOD PROGRAMME, 2000). Pendekatan *enforcement* menjadi tidak relevan karena Nigeria kooperatif dan tidak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan bantuan kemanusiaan.

Dalam hal ini, pendekatan manajerial dan normative merupakan pendekatan yang paling tepat dalam menganalisis implementasi *Country Strategy Plan* oleh WFP dalam menangani permasalahan kerawanan pangan di Nigeria periode 2020-2024. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, karena legitimasi normatif memberikan otoritas moral bagi WFP untuk melakukan intervensi kemanusiaan, sementara metode manajemen memastikan pelaksanaan yang efektif dan berkelanjutan melalui kerja sama antar lembaga. Dalam konteks Nigeria pada periode 2020-2024, keterkaitan ini memungkinkan WFP untuk mengimplementasikan perjanjian pembentukan dengan optimal.

1.7 Argumen Sementara

Implementasi *Country Strategy Plan* oleh WFP dalam menangani kerawanan pangan di Nigeria periode 2020-2024 menunjukkan efektivitas kombinasi pendekatan manajerial dan normatif dalam merespons krisis kerawanan pangan. Periode sebelum tahun 2020, ditandai dengan perubahan karakter kerawanan pangan Nigeria, dimana sebelumnya masalah hanya terlokalisasi di wilayah timur laut akibat konflik Boko Haram, kini berkembang menjadi krisis nasional multifaktor yang dipicu juga oleh pandemi COVID-19, krisis ekonomi dan inflasi, konflik berkelanjutan, dan perubahan iklim, tercermin dari lonjakan dramatis jumlah penduduk yang mengalami kerawanan pangan. Legitimasi normatif WFP yang berlandaskan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/1714 (XVI) tahun 1961 memberikan otoritas moral dan legal yang kuat untuk beroperasi di Nigeria, terutama dalam konteks darurat kemanusiaan yang membutuhkan intervensi cepat dan komprehensif. Sementara itu, pendekatan manajerial yang diimplementasikan melalui monitoring berkelanjutan, pemecahan masalah, dan pengembangan kapasitas memungkinkan WFP bekerja sama secara efektif dengan pemerintah Nigeria dalam menghadapi eskalasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kooperatifnya pemerintah Nigeria dan tidak adanya pelanggaran terhadap kesepakatan bantuan kemanusiaan selama periode 2020-2024 membuat pendekatan *enforcement* menjadi tidak relevan, sehingga kombinasi pendekatan manajerial-normatif terbukti menjadi strategi implementasi yang paling tepat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memahami pentingnya orang-orang dan organisasi yang dianggap sebagai akar dari masalah sosial. Selain itu, untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dan kemudian dideskripsikan dalam penelitian ini, maka metodologi kualitatif yang digunakan (John W. Creswell, J. David Creswell, 2018). Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji dan menganalisis data dari dokumen resmi UN World Food Programme (WFP) serta sumber-sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan isu kerawanan pangan di Nigeria selama periode 2020 hingga 2024. Analisis dilakukan secara deskriptif guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran WFP dalam menangani kerawanan pangan di Nigeria.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah organisasi internasional UN World Food Programme (WFP). Sementara itu, objek penelitian mencakup Implementasi *Country Strategy Plan* oleh WFP dalam menangani kerawanan pangan di Nigeria pada periode 2020-2024.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Sumber tersebut meliputi literatur tertulis seperti, jurnal ilmiah, dokumen resmi WFP, serta berita dan laporan dari media kredibel. Data sekunder dipilih untuk

memberikan landasan yang kuat dalam melakukan analisis terhadap peran WFP dalam mengatasi kerawanan pangan.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data mengenai kondisi kerawanan pangan di Nigeria selama tahun 2020-2024. Data diperoleh dari laporan dan dokumen resmi yang dirilis oleh WFP dan lembaga internasional lainnya. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis menggunakan pendekatan teori "*International Organization and Implementation*" untuk mengevaluasi sejauh mana kontribusi dan efektivitas WFP dalam merespons permasalahan pangan di Nigeria.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN, yang menguraikan latar belakang masalah kerawanan pangan di Nigeria selama periode 2020-2024. Pada bagian ini juga disampaikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II: DINAMIKA KERAWANAN PANGAN DI NIGERIA: UPAYA PEMERINTAH, PERAN WFP, DAN FAKTOR PENYEBAB TAHUN 2020-2024, membahas kondisi kerawanan pangan di Nigeria, menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Nigeria dalam menangani kerawanan pangan, PERAN WFP dan strukturalnya, dan juga penyebab utama krisis.

Bab III: IMPLEMENTASI *COUNTRY STRATEGY PLAN* OLEH WFP DALAM MENANGANI KERAWANAN PANGAN DI NEGERIATAHUN 2020-2024 MELALUI PENDEKATAN MANAJERIAL, memaparkan analisis terhadap implementasi CSP oleh World Food Programme (WFP) dalam menangani kerawanan pangan di Nigeria.

Bab IV: PENUTUP, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk upaya penelitian selanjutnya di masa mendatang.

BAB II

DINAMIKA KERAWANAN PANGAN DI NIGERIA: UPAYA DOEMSTIK, PERAN WFP, DAN FAKTOR PERNYEBAB TAHUN 2020-2024

Dalam bab 2 penulis akan membahas berbagai dinamika kerawanan pangan di Nigeria dalam periode 2020-2024. Pertama, penulis akan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Nigeria dalam menangani kerawanan pangan serta mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dari upaya tersebut. Kedua, menjabarkan peran World Food Programme di Nigeria, termasuk struktur organisasi dan kesepakatan yang telah dibuat dengan pemerintah. Selain itu, menjelaskan pula hubungan antara WFP dan PBB serta bagaimana WFP bisa masuk dan beroperasi di Nigeria. Terakhir, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kondisi kerawanan pangan yang tidak kunjung baik.

2.1 Upaya Pemerintah Nigeria dalam Menangani Kerawanan Pangan

Tahun 2020, pemerintah memberlakukan *lockdown* nasional untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Namun, kebijakan ini mengganggu rantai pasokan pangan dan menyebabkan penurunan pendapatan petani sebesar 40% selama periode *lockdown* (World Bank Group, 2020). Sebagai tanggapan, Kantor Koordinasi Jaring Pengaman Sosial Nasional (NASSCO) meluncurkan Program “*Household Support Program Conditional Cash Transfer,*” Bersyarat untuk memberikan 5.000 naira per bulan kepada 1 juta rumah tangga. Secara bersamaan, Kementerian Federal Bantuan Kemanusiaan, Penanganan Bencana, dan Pembangunan Sosial menerapkan “*Emergency Food Distribution Program*” untuk mendistribusikan beras, kacang-kacangan, dan minyak goreng kepada rumah

tangga rentan (Shikfu Shimang, 2023). Namun, menurut hasil evaluasi program, hanya sekitar 30% dari penerima manfaat yang ditargetkan sebenarnya menerima bantuan tersebut dan ini sangat kurang adil karena tidak meratanya pembagian bantuan tersebut.

Pemerintah Nigeria, telah memperluas “*Anchor Borrower Programme*” (ABP) untuk menjangkau 4,8 juta petani, dengan mengalokasikan 1,3 triliun naira untuk 23 produk pertanian (Bank Sentral Nigeria, 2021). Program ini dirancang untuk mendorong produksi pertanian dengan memberikan pinjaman bersubsidi kepada petani skala kecil. Namun, audit internal oleh Bank Sentral Nigeria menemukan bahwa hanya 65% dana program tersebut digunakan untuk petani yang memenuhi syarat, sementara sisanya dialihkan atau disalahgunakan (Transparency International Nigeria, 2021).

Pada tahun 2022, Presiden Muhammadu Buhari mengumumkan keadaan darurat pangan nasional melalui Dewan Negara Nigeria dan mendirikan Komite Keamanan Pangan Nasional untuk mengoordinasikan langkah-langkah tanggap darurat). *Federal Ministry of Finance* mengalokasikan 500 miliar naira bagi program darurat pangan, yang mencakup distribusi pupuk bersubsidi, benih berkualitas tinggi, dan bantuan tunai kepada 10 juta petani (Federal Ministry of Finance, Budget, and National Planning, 2022). Namun, Kantor Auditor Jenderal Federasi melaporkan adanya masalah koordinasi dan korupsi pada tingkat implementasi, hingga hanya 40% dari bantuan yang sudah dialokasikan sampai ke petani sasaran,

Pada tahun 2023, Presiden Nigeria mengumumkan penghapusan subsidi bahan bakar dalam pidato pelantikannya yang disampaikan di Istana Kepresidenan. Bank Sentral Nigeria juga menerapkan kebijakan pasar valuta asing terpadu pada Juni 2023 (Bank Sentral Nigeria, 2023). Adanya dua kebijakan ini menyebabkan lonjakan tajam inflasi pangan, yakni mencapai 30,6% pada 2023 (Jung, 2023). *Federal Ministry of Budget and National Planning* meluncurkan Program Dukungan Presiden, dengan mengalokasikan 500 miliar naira untuk bantuan sosial, termasuk distribusi 42.000 ton beras dan bantuan tunai sebesar 8.000 naira untuk 12 juta rumah tangga (Federal Ministry of Budget and National Planning, 2023). Akan tetapi, survei yang dilakukan oleh *Nigerian Labour Congress* menunjukkan bahwa 70% penduduk dilaporkan memiliki penurunan daya beli yang signifikan (Nigerian Labour Congress, 2023).

Di tahun 2024, Pemerintah Nigeria terus berupaya untuk menstabilkan perekonomian dan meningkatkan produksi pertanian melalui berbagai langkah. Namun, tantangan struktural seperti konflik, perubahan iklim, dan infrastruktur yang tidak memadai tetap menjadi hambatan utama. Meskipun ada komitmen politik, efektivitas upaya pemerintah seringkali terhambat oleh skala masalah yang besar dan sumber daya yang terbatas (NBS, 2024).

2.2 Kehadiran WFP di Nigeria: Mandat dan Landasan Operasional

World Food Programme (WFP) adalah organisasi kemanusiaan terkemuka di dunia yang berdedikasi untuk memerangi kelaparan. World Food Programme didirikan pada tahun 1961 berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 1714 (XVI)

dan Resolusi Konferensi FAO 1/61, dan merupakan entitas yang ditempatkan di bawah naungan PBB dan FAO (United Nations., 1961). Mandat utama World Food Programme berasal dari dokumen pendiriannya, meliputi penyediaan bantuan pangan dalam keadaan darurat, memperkuat ketahanan pangan jangka panjang, dan mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara World Food programme (WFP) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan faktor kunci dalam perjuangan global melawan kelaparan dan malnutrisi. Sebagai badan khusus PBB, World Food Programme merupakan bagian dari sistem PBB.

2.3 Kesepakatan dan Struktur Organisasi World Food Programme

Kesepakatan dan struktur organisasi WFP untuk operasi di Nigeria didasarkan pada kerangka kerja PBB dan perjanjian serta prinsip-prinsip yang telah disepakati dengan pemerintah Nigeria:

1. Prinsip-prinsip Kemanusiaan: Bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, atau pendapat politik (World Food Programme, 2024a).
2. Netralitas dan imparialitas: WFP tidak memihak dalam konflik dan memberikan bantuan kepada semua yang membutuhkan, terlepas dari pihak mana yang terlibat dalam konflik (World Food Programme, 2024a).
3. Kemandirian operasional: Operasi Program Pangan Dunia tidak dipengaruhi oleh faktor politik atau militer, memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang membutuhkan (World Food Programme, 2024a).

Struktur WFP di Nigeria mencakup kantor pusat di Abuja dan kantor lapangan strategis di wilayah-wilayah yang paling terdampak krisis, seperti Borno, Adamawa, dan Yobe, untuk memastikan akses ke komunitas yang membutuhkan (World Food Programme, 2023a). WFP bekerja sama erat dengan beberapa lembaga pemerintah Nigeria melalui perjanjian formal dan kemitraan komersial:

1. *Ministry of Agriculture and Rural Development (FMARD)*: kolaborasi dalam program-program yang bertujuan meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan (WFP, 2024).
2. *Ministry of Health (FMoH)*: pembentukan kemitraan dalam program-program gizi, khususnya untuk ibu dan anak, serta penguatan sistem kesehatan lokal (WFP, 2024).
3. *National Emergency Management Agency (NEMA)* dan *State Emergency Management Agencies (SEMA)*: kolaborasi dalam manajemen logistik, tanggap darurat, dan distribusi kebutuhan dasar (WFP, 2024).
4. *National Social Safety Net Coordination Office (NASSCO)*: koordinasi program bantuan tunai dan jaring pengaman sosial (WFP, 2024).
5. *National Bureau of Statistics (NBS)*: berbagi data dan informasi untuk analisis ketidakamanan pangan dan pemantauan dampak program (WFP, 2024).

2.4 Peran World Food Programme di Nigeria tahun 2020-2024

World Food Programme (WFP) melaksanakan tugasnya di Nigeria melalui berbagai program, termasuk bantuan darurat, peningkatan kapasitas, dan penguatan

sistem pangan lokal, seringkali bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Pada tahun 2020, WFP merespons dampak awal COVID-19 dengan meningkatkan bantuan pangan dan keuangan untuk 1,2 juta orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di bagian timur laut wilayah Nigeria (WFP, 2020). Data dari Kerangka Terpadu dan IPC digunakan untuk memetakan ketidakamanan pangan dan mendukung pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah . Pada tahun 2021, WFP memberikan bantuan teknis kepada NEMA dan SEMAs serta melatih lebih dari 500 pejabat dalam manajemen logistik dan tanggap darurat (WFP, 2021). Program mVAM diluncurkan untuk memantau ketidakamanan pangan secara real-time melalui telepon dan SMS (WFP, 2021). Pada tahun 2022, program *Digital Farmers* diluncurkan, melatih lebih dari 10.000 petani untuk menggunakan teknologi digital guna meningkatkan hasil panen. WFP juga memperkuat pemantauan pasca-distribusi (PDM) melalui kolaborasi dengan komunitas dan mitra independent (WFP, 2023a). Pada tahun 2023, WFP akan menerapkan integrasi pemantauan strategis untuk menilai secara komprehensif keberhasilan program. Program “Gizi Ibu dan Anak” telah memberikan manfaat bagi lebih dari 150.000 keluarga, membantu mengurangi malnutrisi parah (WFP, 2023a). Akhirnya, pada tahun 2024, WFP akan memperkenalkan sistem *Data for Decision-Making* (D4D), yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memprediksi risiko ketidakamanan pangan dan mengurangi waktu respons. WFP juga telah memperkuat kapasitas lembaga lokal melalui pelatihan pengambilan keputusan berbasis data (World Food Programme, 2024). Melalui inisiatif ini, WFP tidak hanya memberikan bantuan darurat tetapi juga mendukung pembangunan kapasitas

jangka panjang dan ketahanan Nigeria. Hal ini sejalan dengan misi World Food Programme untuk mengakhiri ketidakamanan pangan dan mencapai keamanan pangan.

2.5 Permasalahan Kerawanan pangan di Nigeria tahun 2020-2024

Kerawanan pangan di Nigeria dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk konflik bersenjata, perubahan iklim, krisis ekonomi, pertumbuhan populasi dan kebijakan pangan yang kurang efektif. Konflik berkepanjangan dapat menghambat produksi serta distribusi pangan, semetara itu bencana alam dan degradasi lingkungan memperburuk ketidakstabilan pasokan. Dari segi ekonomi, minimnya investasi di sektor pertanian dan tingginya inflasi dapat melemahkan daya beli masyarakat terhadap pangan.

2.5.1 Pandemi COVID-19 Memperburuk Kerawanan Pangan di Nigeria

Sejak kasus COVID-19 pertama terkonfirmasi di Nigeria pada bulan Februari 2020, pemerintah menerapkan pembatasan pergerakan dan aktivitas sosial untuk membatasi penyebaran virus. Kebijakan ini berdampak kurang baik terhadap rantai pasokan pangan, produksi pertanian, distribusi bahan pangan, serta akses pasar bagi petani kecil. Pembatasan mengganggu aktivitas pertanian musiman sehingga menyebabkan gangguan besar terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Jumlah penduduk Nigeria yang mengalami kerawanan pangan akut meningkat secara signifikan dari tahun 2019 dengan jumlah 7,1 juta orang menjadi 9,8 juta orang pada 2020, lonjakan ini sebesar 38% (FSIN, 2020). Hal ini menjadi awal peningkatan kerentanan pangan yang berkelanjutan. Sektor pertanian berperan

penting dalam perekonomian Nigeria, dengan 79% rumah tangga yang bergantung pada pertanian melaporkan penurunan pendapat, memperparah ketidakstabilan ekonomi masyarakat pedesaan (World Bank and National Bureau of Statistics, 2020).

Dampak buruk dari pandemi terus saja berlanjut memasuki tahun 2021, di mana kondisi ketahanan pangan di Nigeria semakin terpuruk. Selama periode puncak musim kelaparan antara Juni hingga Agustus 2021, jumlah orang yang mengalami kerawanan pangan akut di Nigeria meningkat menjadi 12,8 juta orang, ini menunjukkan kenaikan 30% dari tahun sebelumnya (Food and Agriculture Organization and Cadre Harmonisé, 2021). Meskipun pemerintah mulai melonggarkan berbagai batasan terkait COVID-19.

Pada tahun 2022 dampak dari pandemi masih terasa, terutama pada struktur ekonomi dan sistem pangan nasional. Dalam catatan *Global Report on Food Crises* tercatat bahwa di tahun 2022, jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan akut melonjak menjadi 19,5 juta orang. Hal ini mengkhawatirkan dalam krisis pangan nasional (Food Security Information Network and Global Report on Food Crises, 2022).

Di tahun 2023, Nigeria menunjukkan pemulihan dari dampak pandemi, namun konsekuensi jangka panjang dari guncangan ekonomi dan gangguan pada sistem pangan masih sangat membebani Nigeria. Dari laporan yang ada sebanyak 24,9 juta orang mengalami kerawanan pangan akut pada periode Oktober sampai Desember 2023, ini memperlihatkan bahwasanya sistem pangan nasional belum

sepenuhnya pulih. (Food Security Information Network and Global Report on Food Crises, 2024).

Kemudian di tahun 2024, menjadi puncak dari kerawanan pangan yang terjadi di Nigeria, sebab lonjakan yang sangat besar menjadi 31,5 juta orang (Food Security Information Network and Global Report on Food Crises, 2024). Angka ini menunjukkan akumulasi dari terpuruknya ekonomi yang secara terus menerus dan lemahnya mekanisme perlindungan sosial di Nigeria sendiri. Pandemi COVID-19 memperlihatkan bagaimana krisis kesehatan global menyebabkan ketidakstabilan yang berkepanjangan dalam sistem pangan nasional, khususnya di negara dengan kerentanan struktural yang sudah terjadi sebelumnya seperti di Nigeria.

Tabel 2.1 Permasalahan Kerawanan Pangan di Nigeria yang Disebabkan oleh Pandemi COVID-19

Tahun	Jumlah Penduduk yang Mengalami Kerawanan Pangan Akut	Persentase Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Keterangan
2020	9,8 juta jiwa	-	Adanya pembatasan pergerakan dan aktivitas sosial yang diterapkan pemerintah.
2021	12,8 juta jiwa	30 %	Dampak yang berlanjut dari pembatasan COVID-19.
2022	19,5 juta jiwa	52%	Meskipun pembatasan dilonggarkan, namun dampak pandemi masih terasa.
2023	24,9 juta jiwa	27,7%	Konsekuensi jangka panjang dari guncangan ekonomi.
2024	31,5 juta jiwa	26,6 %	Menunjukkan dampak nyata dari pandemi dan kerentanan.

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis dari tahun 2020-2024

2.5.2 Krisis Ekonomi dan Inflasi Menyebabkan Kerawanan Pangan di Nigeria

Ekonomi Nigeria mengalami resesi parah pada tahun 2020 dengan penurunan nilai mata uang Naira yang meningkatkan inflasi pangan dan mengurangi daya beli masyarakat yang terdampak pandemi. Penurunan pendapatan industri minyak menyulitkan pemerintah membiayai subsidi pangan dan program bantuan sosial, sementara ketergantungan ekspor minyak membuat perekonomian sangat rentan terhadap perubahan harga komoditas global (International Monetary Fund, 2020). Kondisi ini memperburuk kerawanan pangan, karena masyarakat tidak mampu membeli makanan saat harga naik, sementara jutaan orang kehilangan pekerjaan di sektor informal yang berdampak pada ketidakmampuan keluarga dalam mengakses pangan (International Labour Organization, 2020).

Memasuki tahun 2021, pemulihan ekonomi berjalan lambat dengan inflasi pangan tetap tinggi akibat gangguan produksi domestik dan ketidakamanan di wilayah produktif. Ketimpangan ekonomi melebar dengan jurang pendapatan perkotaan-pedesaan yang besar, memperpanjang kerawanan pangan bagi kelompok miskin. Defisit fiskal yang tinggi memaksa pemerintah mengurangi investasi sektor pertanian dan infrastruktur di pedesaan, menyebabkan stagnasi produktivitas jauh dibawah standar global dan berpotensi terciptanya kerawanan pangan jangka panjang karena mengurangi kapasitas produksi domestik (NBS, 2021).

Di tahun 2022, sistem pasokan makanan terganggu oleh krisis energi global akibat perang Rusia-Ukraina, yang mengakibatkan kekurangan bahan bakar meskipun Nigeria memproduksi minyak. Kenaikan biaya pupuk, transportasi, dan harga impor komoditas dasar menyebabkan inflasi pangan melonjak dan gangguan

rantai pasokan (Nweke et al., 2022). Subsidi bahan bakar yang signifikan membebani anggaran negara dan mengurangi pendanaan untuk sektor produktif, disisi lain pelarian modal menunjukkan penurunan kepercayaan investor (International Monetary Fund, 2023). Gejolak ini mengacaukan perencanaan produksi dan meningkatkan ketidakpastian harga pangan.

Pada tahun 2023, akibat penghapusan subsidi bahan bakar harga jadi melonjak tajam, dengan Inflasi pangan mencapai tingkat tertinggi dalam 20 tahun terakhir (International Monetary Fund, 2023). Kerawanan pangan semakin parah akibat reformasi ini, tiba-tiba meningkatkan biaya hidup tanpa persiapan individu. Penyatuan nilai tukar menyebabkan depresiasi tajam mata uang dan inflasi impor, terutama untuk bahan pangan (Eze Jude Obinna Ph.D, 2024). Kenaikan biaya hidup memicu keresahan sosial dan protes besar, sementara program bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah terhambat (Onuoha, 2023). Ketidakstabilan sosial memperparah kerawanan pangan, dengan sektor swasta menghadapi tekanan besar, banyak perusahaan mengurangi produksi hingga tutup menyebabkan pengangguran dan berkurangnya kapasitas industri (Dr Kwode E. Israel & Gad Charity, 2024). Penurunan lapangan pekerjaan dan produksi barang, terutama makanan olahan, semakin memperburuk kerawanan pangan.

Tahun 2024 inflasi masih tinggi, meskipun mulai menurun sebagai hasil dari inisiatif stabilisasi ekonomi. Inisiatif ketahanan pangan belum diterapkan menyeluruh dan daya beli belum sepenuhnya pulih, sehingga kerawanan pangan masih menjadi masalah utama. Stabilitas pasar valuta asing dan pertumbuhan cadangan devisa memberikan penyangga lebih kuat untuk impor pangan, dengan

investasi pengolahan hasil pertanian, kontribusi sektor non-minyak meningkat, dan reformasi struktural mulai berjalan (NBS, 2024). Dengan stabilitas dan perubahan ini, ada harapan bahwa kerawanan pangan jangka panjang akan menurun.

Tabel 2.2 Kerawanan Pangan di Nigeria Akibat Krisis Ekonomi dan Inflasi

Tahun	Peristiwa	Penyebab Kerawanan Pangan
2020	Resesi ekonomi parah akibat pandemi COVID-19, penurunan nilai mata uang Naira, dan jutaan kehilangan pekerjaan.	Penurunan daya beli masyarakat, penurunan pendapatan industri minyak, keterbatasan subsidi pangan pemerintah dan ketergantungan pada ekspor.
2021	Pemulihan ekonomi lambat dengan inflasi pangan tinggi dan ketimongan ekonomi yang melebar.	Defisit fiskal tinggi mengurangi investasi sektor pertanian, menciptakan kerawanan pangan jangka panjang.
2022	Krisis energi global akibat perang Rusia-Ukraina menyebabkan kekurangan bahan bakar dan inflasi pangan.	Gangguan rantai pasokan dan kenaikan biaya input pertanian membuat pangan langka dan mahal.
2023	Penghapusan subsidi bahan bakar menyebabkan kenaikan harga drastis dan inflasi pangan tertinggi dalam 20 tahun.	Shock reformasi meningkatkan biaya hidup secara tiba-tiba, memperparah kerawanan pangan
2024	Stabilisasi ekonomi bertahap dengan inflasi mulai menurun namun daya beli belum pulih sepenuhnya.	Pemulihan yang lambat membuat kerawanan pangan masih menjadi masalah serius di Nigeria.

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis dari tahun 2020-2024

2.5.3 Konflik Bersenjata dan Ketidakamanan Menjadi Faktor Terjadinya Kerawanan Pangan di Nigeria

Pada tahun 2020, di wilayah timur laut Nigeria mengalami gangguan besar dalam produksi pangan, akibat konflik bersenjata yang terus berlanjut, terutama oleh kelompok militan seperti Boko Haram dan *Islamic State West Africa Province* (ISWAP). Konflik di bagian Borno, Adamawa, dan Yobe merupakan daerah pusat

produksi pertanian, menyebabkan banyak penduduk yang meninggalkan lahannya demi keselamatan. Kelompok militan sering menyerang petani, hingga membakar lahan pertanian (UNHCR, 2020). Tragedi mengerikan dilakukan oleh Boko Haram dengan membunuh sebanyak 110 petani di desa Koshibe, Borno. Kondisi ini membuat penurunan produksi pangan di Nigeria dan meningkatkan kerawanan pangan, dengan sekitar 4,4 juta jiwa mengalami kelaparan akut (AP NEWS, 2023).

Di tahun 2021, kekerasan antara petani dan penggembala di wilayah tengah Nigeria mengalami peningkatan diakibatkan kompetisi yang semakin intens atas sumber daya alam seperti air dan lahan subur. Kekeringan dan degradasi lahan memaksa penggembala berpindah wilayah ke tempat yang lebih subur yang seringkali sudah dihuni para petani, yang berujung memakan korban jiwa dan merusak infrastruktur di pedesaan akibat bentrokan. Di tahun sebelumnya, konflik ini menyebabkan lebih dari 3.600 jiwa terenggut mengalami peningkatan di tahun 2021 (International crisis group, 2021).

Pada tahun 2022, terjadi kerusakan luas pada infrastruktur pertanian dan penghambatan produksi pangan. Sebanyak 4.777 insiden penculikan yang pernah terjadi, membuat para petani enggan kembali ke ladang (International Crisis Group, 2022). Para petani harus membayar 15-20% pendapatannya sebagai “pajak” kepada organisasi bersenjata, fenomena ini dikenal sebagai “*taxation by bandits*”. Biaya “izin bertani” mencapai 50.000 Naira per hektare di Negara Bagian Zamfara, memaksa para petani dan lainnya meninggalkan tanah mereka. Sementara, para penggembala menghadapi tantangan pembatasan akses akibat ketegangan yang terjadi (Opeyemi Adewale, 2024).

Tahun 2023 peningkatan pengungsi di Nigeria mencapai 3,2 juta jiwa, mayoritas ialah penduduk yang terdampak konflik. Perpindahan menyebabkan kepadatan pengungsi dan terbatasnya akses terhadap lahan. Ini membuat ketergantungan pada bantuan kemanusiaan serta meningkatkan angka malnutrisi di Nigeria (UNHCR, 2023). Adanya “*ungoverned spaces*” menciptakan tempat berlindung bagi organisasi kriminal dan teroris. Akibatnya, secara progresif memperluas zona konflik dan mengurangi ruang aman untuk pertanian (Jamiu, M. S., Ishola, H. S., & Towoju, A. J., 2024). Infrastruktur pertanian jangka panjang pun menjadi rusak, seperti sistem irigasi yang rusak, jalan pertanian, dan fasilitas penyimpanan,

Memasuki tahun 2024, konflik bersenjata dan ketegangan masih berlanjut dengan peningkatan 25% insiden kekerasan bersenjata dibanding tahun sebelumnya (ACLEDD, 2024a). Menjadikan Nigeria salah satu negara dengan perpindahan pengungsi internal tertinggi di dunia (ACLEDD, 2024b). Kemudian, populasi pengungsi mengalami kondisi yang memprihatinkan, dengan konsumsi makanan yang minim dan melakukan strategi koping darurat seperti mengurangi frekuensi makan, menjual aset-aset penting atau meminjam makanan demi untuk bertahan hidup (IOM, 2024). Situasi ini memperjelas bahwa konflik bersenjata merusak kehidupan sosial dan politik masyarakat bahkan menghancurkan fondasi ekonomi lokal berbasis pertanian (UNHCR, 2025).

Tabel 2.3 Kerawanan Pangan di Nigeria Akibat Konflik Bersenjata dan Ketidakamanan

Tahun	Peristiwa	Penyebab Kerawanan Pangan
2020	Serangan Boko Haram menyebabkan penurunan hasil panen.	Adanya gangguan produksi pertanian akibat serangan militan dan pembakaran lahan pertanian.
2021	Peningkatan bentrokan antara petani dan penggembala di wilayah tengah Nigeria.	Persaingan sumber daya alam yang semakin intens, diperburuk oleh perubahan iklim.
2022	Ketidakamanan berlanjut, menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur pertanian.	Ketidakmampuan petani untuk kembali ke ladang karena takut serangan, ini menghambat produksi pangan.
2023	Peningkatan jumlah pengungsi akibat konflik bersenjata.	Secara progresif memperluas zona konflik dan mengurangi ruang aman untuk masyarakat.
2024	Peningkatan jumlah insiden kekerasan bersenjata dibanding tahun sebelumnya.	Ketidakstabilan yang semakin akut, memperburuk situasi kerawanan pangan dan akses terhadap sumber daya.

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis dari tahun 2020-2024

2.5.4 Faktor Bencana Alam dan Perubahan Iklim terhadap Kerawanan Pangan di Nigeria

Tahun 2020, walaupun perhatian global banyak terfokus pada pandemi COVID-19, namun sektor pertanian di Nigeria mulai merasakan dampak dari pola cuaca yang tidak menentu. Dalam laporan Seasonal Rainfall Prediction oleh Nigerian Methodology Agency (NiMet) mencatat bahwa musim hujan mengalami keterlambatan di beberapa wilayah utara dan curah hujan yang tidak merata, ini sangat mengganggu jadwal penanaman dan hasil panen dari berbagai daerah pertanian (NiMet, 2020). Di sisi lain, kekeringan di wilayah Sahel menurunkan produktivitas pertanian sebesar 45% dan memperburuk konflik antara petani dan penggembala yang memperebutkan sumber air yang semakin langka. Banjir dan

kekeringan yang terjadi secara bersamaan menciptakan krisis pangan multidimensi, di mana lahan pertanian yang rusak tidak dapat menghasilkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketidakpastian ketersediaan pangan ini menyebabkan kerawanan pangan yang signifikan.

Memasuki tahun 2021, terjadi banjir musiman yang berdampak pada produksi pangan, terutama di Nigeria bagian utara. *Federal Ministry of Agriculture* memperkirakan bahwa 75.000 hektar lahan pertanian terkena dampak banjir. Banjir ini mengganggu aktivitas pertanian dan menyebabkan kerugian pada lahan pertanian (Federal Ministry of Agriculture, 2021). Kerusakan yang luas pada lahan pertanian dan infrastruktur pertanian akibat banjir mengakibatkan penurunan produksi pangan secara drastis. Lalu kenaikan harga pangan yang tajam membuat akses terhadap makanan menjadi semakin sulit bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah berada dalam kondisi rentan.

Titik kritis terjadi di 2022, banjir terburuk dalam sejarah di Nigeria yang melanda 33 wilayah. Dengan 2,4 juta jiwa mengungsi dan ada setidaknya 603 jiwa meninggal dunia. Dampak terhadap sektor pertanian sangat besar, dengan kerusakan pada 676.000 hektar lahan pertanian dan kerugian mencapai 70.000 ton hasil panen yang disimpan. Laporan dari FAO memperkirakan kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut sebesar \$1,5 miliar atas produksi tanaman seperti padi dan biji-bijian, semuanya mengalami kerusakan (OCHA, 2022)

Pada tahun 2023, upaya pemulihan dari banjir akan dilakukan namun terhambat oleh curah hujan yang tidak teratur di beberapa wilayah daerah pertanian utama. Efek dari perubahan iklim semakin terasa dengan peningkatan curah hujan

sebesar 18% dibandingkan rerata historis, hal ini dikemukakan dalam laporan *Nigerian Hydrological Services Agency* (NIHSA, 2023). Ketidapastian dalam pola cuaca membuat petani kesulitan untuk merencanakan kapan akan tanam, yang mana ini berujung pada gagal panen. Sehingga mengurangi kapasitas untuk memproduksi pangan, hingga membuat pangan menjadi langka dan harga yang ada dipasaran melonjak tinggi.

Dalam tahun 2024, banjir musiman yang intensif terjadi antara Juli hingga September merusak lebih dari 350.000 hektar lahan pertanian di 21 wilayah di Nigeria. Hal ini mempengaruhi produksi beras dan jagung di wilayah bagian tengah dan utara. Pola curah hujan tahun 2024 menunjukkan ketidakteraturan, dengan beberapa daerah mengalami banjir bandang sedangkan yang lain mengalami kekeringan yang berkelanjutan (NiMet, 2024). Secara keseluruhan dalam periode 2020-2024 menunjukkan bahwa perubahan iklim dan bencana alam telah memberikan dampak terhadap kerawanan pangan di Nigeria. Bencana-bencana seperti banjir besar dan kekeringan berkepanjangan sangat mengganggu produksi pertanian yang mana ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan meningkatkan kerentanan masyarakat Nigeria terhadap kerawanan pangan.

Tabel 2.4 Kerawanan Pangan di Nigeria Akibat Faktor Bencana Alam dan Perubahan Iklim

Tahun	Peristiwa	Penyebab Kerawanan Pangan
2020	Musim hujan mengalami keterlambatan dan curah hujan yang tidak merata, mengganggu jadwal penanaman.	Ketidakpastian ketersediaan pangan akibat pola cuaca yang tidak menentu dan kekeringan di wilayah Sahel.
2021	Banjir musiman berdampak pada 75.000 hektar lahan pertanian di Nigeria bagian utara	Kerugian pada lahan pertanian yang mengganggu aktivitas pertanian dan produksi pangan.
2022	Banjir terburuk dalam sejarah melanda 33 wilayah, mengakibatkan 2,4 juta jiwa pengungsi	Kerusakan pada 676.000 hektar lahan pertanian dan kerugian produksi mencapai \$1,5 miliar.
2023	Curah hujan tidak teratur menghambat upaya pemulihan dari banjir	Ketidakpastian pola cuaca menyebabkan kesulitan dalam perencanaan tanam, berujung pada gagal panen
2024	Banjir musiman merusak lebih dari 350.000 hektar lahan pertanian di 21 wilayah	Ketidakteraturan pola cuaca hujan menyebabkan kerugian dalam produksi beras dan jagung

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis dari tahun 2020-2024

BAB III

**IMPLEMENTASI *COUNTRY STRATEGY PLAN* OLEH WFP DALAM
MENANGANI KERAWANAN PANGAN DI NIGERIA TAHUN 2020-2024
MELALUI PENDEKATAN MANAJERIAL**

World Food Programme (WFP) menerapkan *Country Strategy Plan* (CSP) sebagai instrumen operasional utama untuk memberikan bantuan yang terstruktur dan berkelanjutan. CSP bertujuan sebagai kerangka kerjasama strategis antara WFP dan Pemerintah Nigeria, yang mengatur implementasi program bantuan kemanusiaan dan inisiatif pengembangan kapasitas selama kurun waktu 2020-2024. Lebih dari sekadar dokumen perencanaan, CSP menetapkan arsitektur koordinasi, sistem pemantauan, dan mekanisme evaluasi yang menjamin transparansi dan efektivitas intervensi (World Food Programme, 2023). Analisis terhadap implementasi CSP oleh WFP di Nigeria akan menggunakan kerangka teori "*International Organization and Implementation*" yang dikembangkan oleh Joachim, Reinalda, dan Verbeek (2007), dengan menekankan pada pendekatan manajerial dan normatif. Pada pendekatan normatif akan mengkaji dasar legitimasi operasional WFP di Nigeria, yang mana ini bersumber dari mandat kemanusiaan internasional. Sementara itu, pendekatan manajerial akan menjadi inti analisis, dengan mengeksplorasi dua aspek fundamental: (1) pemantauan yang meliputi pelaporan negara, komite ahli, inspeksi lapangan, dan kontribusi organisasi masyarakat sipil; serta (2) pengembangan kapasitas dan penyelesaian masalah melalui konsultasi ahli, interpretasi kebijakan, dukungan finansial, dan asistensi teknis (Joachim 2007, 8-13). Kerangka analisis ini dipilih karena mencerminkan karakteristik operasional WFP sebagai organisasi kemanusiaan.

3.1 Pendekatan Normatif: Legitimasi dan Mandat WFP

Legitimasi operasional WFP di Nigeria dalam mengimplementasikan CSP didasarkan kepada mandat kemanusiaan yang kuat sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan FAO. Dasar utama legitimasi ini ialah Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/1714 (XVI) tanggal 19 Desember 1961, yang secara resmi mendirikan WFP dan memberikan mandate untuk menyediakan bantuan pangan darurat serta mendukung ketahanan pangan di negara-negara yang mengalami krisis (United Nations., 1961). Resolusi ini memberikan otoritas moral dan legal bagi World Food Programme untuk melakukan intervensi kemanusiaan.

3.2 Pendekatan Manajerial dalam Implementasi CSP oleh World Food Programme di Nigeria

World Food Programme (WFP) menerapkan pendekatan manajerial komprehensif dalam implementasi *Country Strategic Plan* (CSP) di Nigeria untuk memastikan program-program tersebut secara efektif menangani berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kerawanan pangan di negara tersebut. Pendekatan ini terdiri dari dua komponen utama yang saling memperkuat: *monitoring* dan *capacity building/problem solving*. Kedua komponen ini diimplementasikan secara sistematis untuk memberikan respons yang tepat terhadap krisis multidimensi yang dihadapi Nigeria selama periode 2020-2024.

3.2.1 *Monitoring*

Sistem *monitoring* WFP dalam implementasi CSP di Nigeria di rancang untuk memberikan informasi *real-time* mengenai situasi kerawanan pangan dan efektivitas program. Dalam hal ini, *monitoring* menggunakan kerangka teoritis pendekatan manajerial: *state reporting*, *expert committees*, *inspections* dan *NGO Report* (Joachim 2007, 8-13).

3.2.1.1 *Monitoring Berdasarkan State Reporting (Laporan Negara)*

Monitoring berdasarkan laporan negara merupakan landasan utama dan tulang punggung sistem *monitoring* WFP dalam implementasi CSP, di mana data dan informasi komprehensif dari berbagai lembaga pemerintah Nigeria diintegrasikan diintegrasikan melalui platform digital canggih mVAM (*mobile Vulnerability Analysis and Mapping*), sistem *monitoring* berbasis teknologi mobile yang dirancang khusus untuk analisis kerentanan dan pemetaan *real-time* (WFP, 2021). Dalam hal ini, memberikan gambaran lengkap, dan akurat mengenai kerawanan pangan dan kebutuhan bantuan darurat di seluruh Nigeria secara *real-time*. Sistem ini secara langsung dan responsif menangani faktor-faktor kompleks yang menyebabkan ketidakamanan pangan, mulai dari dampak menghancurkan pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasokan dan mata pencaharian, hingga krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi tinggi dan penurunan daya beli, konflik bersenjata berkepanjangan yang menghambat produksi pertanian dan menyebabkan pengungsian massal, hingga bencana alam berulang seperti banjir

dan kekeringan yang merusak infrastruktur pertanian dan mengurangi produktivitas pangan.

Data *monitoring* menunjukkan peningkatan dramatis dalam kerawanan pangan di Nigeria selama periode implementasi CSP tahun 2020-2024. Jumlah orang yang mengalami ketidakamanan pangan akut meningkat dari 9,8 juta pada tahun 2020 menjadi 31,5 juta pada tahun 2024, mencerminkan dampak kumulatif dari berbagai krisis yang saling berinteraksi orang (Food Security Information Network and Global Report on Food Crises, 2024). Peningkatan ini memaksa WFP untuk terus meningkatkan alokasi dana dari \$150 juta pada tahun 2020 menjadi \$650 juta pada tahun 2024, menunjukkan responsivitas sistem *monitoring* dalam mendeteksi perubahan kebutuhan bantuan.

Kerjasama strategis dengan *Federal Ministry of Agriculture and Rural Development* (FMARD) telah menghasilkan laporan periodik yang komprehensif dan rinci mengenai produktivitas pertanian, pola tanam, hasil panen, dan kondisi infrastruktur pertanian yang langsung terkait dengan bencana alam dan perubahan iklim (Federal Ministry of Agriculture, 2021). Data yang diperoleh dari FMARD menunjukkan penurunan drastis sebesar 45% dalam produktivitas pertanian di wilayah Sahel pada tahun 2020 akibat kekeringan berkepanjangan yang menghancurkan tanaman pangan utama, serta kerusakan parah pada 676.000 hektar lahan pertanian akibat banjir dahsyat pada tahun 2022, yang menyebabkan kerugian ekonomi sebesar \$1,5 miliar dan menghancurkan mata pencaharian jutaan petani kecil (OCHA, 2022).

National Emergency Management Agency (NEMA) menyediakan data real-time kritis tentang orang yang mengungsi secara internal (IDPs) dan korban bencana, yang menjadi dasar utama untuk menargetkan program WFP, dengan jumlah IDPs mencapai 3,2 juta pada tahun 2023 akibat eskalasi konflik bersenjata dan ketidakamanan (UNHCR, 2023). Data ini memungkinkan WFP untuk mengidentifikasi lokasi yang paling membutuhkan intervensi darurat dan merancang program yang ditargetkan untuk populasi yang paling rentan.

The National Statistics Agency turut berkontribusi dengan menyediakan data penting mengenai tingkat kemiskinan, inflasi pangan, dan indikator sosio-ekonomi lainnya yang mencerminkan dampak mendalam dari krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Selama krisis ini, 79% rumah tangga petani melaporkan penurunan pendapatan yang signifikan selama pandemi COVID-19, dan inflasi pangan mencapai rekor tertinggi 30,6% pada tahun 2023 (World Bank and National Bureau of Statistics, 2020). Data ini menjadi dasar untuk merancang Data ini menjadi dasar untuk merancang *Cash Transfer Programs (CBT)* dan Program Intervensi Ekonomi yang dapat membantu komunitas mengatasi tekanan ekonomi dan mempertahankan akses terhadap makanan bergizi.

Sistem pelaporan negara ini juga mengintegrasikan data dari *State Emergency Management Agencies (SEMAs)* di 36 negara bagian Nigeria, memberikan perspektif lokal dan rinci tentang kondisi ketidakamanan pangan di tingkat komunitas, memungkinkan WFP untuk menargetkan dengan lebih tepat dan merancang intervensi yang disesuaikan dengan konteks lokal spesifik. Integrasi data multi-level ini menciptakan sistem peringatan dini yang kokoh dan

memungkinkan WFP untuk mengantisipasi krisis sebelum mencapai tingkat katastrofik, memungkinkan respons proaktif daripada reaktif (WFP, 2023).

3.2.1.2 *Monitoring Berdasarkan Expert Committees (Komite Ahli)*

Sistem *monitoring* yang menggunakan komite ahli dalam implementasi *Country Strategic Plan* (CSP) oleh World Food Programme dirancang untuk memberikan analisis independen dan rekomendasi strategis berdasarkan keahlian teknis. Pendekatan ini sangat penting untuk mengatasi kompleksitas krisis multidimensi yang dihadapi Nigeria. Dalam hal ini, WFP mendirikan Komite Pengawasan Teknis bekerja sama dengan pemerintah Nigeria pada tahun 2022, melibatkan ahli dari *Federal Ministry of Agriculture and Rural Development* (FMARD), *National Bureau of Statistics* (NBS), *National Population Commission* (NPC), dan *Nigerian Institute for Social and Economic Research* (NISER) (WFP, 2022). Komite ini juga melibatkan ahli internasional spesialis dalam ekonomi pertanian dan *food security*, serta ahli dalam pengukuran kerawanan pangan dan gizi.

Integrasi *Monitoring Strategis*, yang diperkenalkan pada tahun 2023, merupakan inovasi penting dalam sistem *monitoring* berbasis ahli, di mana program evaluasi komprehensif mengintegrasikan semua data *monitoring* dari tahun-tahun sebelumnya untuk memberikan analisis holistik mengenai efektivitas CSP (World Food Programme, 2023a). Tim evaluasi independen yang melibatkan mitra nasional dan internasional menghasilkan rekomendasi strategis yang menunjukkan bahwa lebih dari lima juta orang menerima bantuan yang memadai berdasarkan

penargetan yang akurat. Kemudian, sistem *Data for Decision Making* (D4D) berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diluncurkan pada tahun 2024 mewakili puncak evolusi *monitoring* berbasis ahli, di mana algoritma pembelajaran mesin menganalisis data historis, ramalan cuaca dari Nigerian Meteorological Agency (NiMet), indikator pasar, dan data pergerakan populasi untuk memprediksi risiko ketidakamanan pangan hingga tiga bulan ke depan (World Food Programme, 2024). Sistem ini berhasil mengurangi waktu respons bantuan dari rata-rata tiga minggu menjadi kurang dari tujuh hari, menunjukkan efektivitas *monitoring* berbasis ahli dalam meningkatkan responsivitas program.

Komite ahli juga memainkan peran penting dalam menganalisis interaksi antara berbagai faktor yang menyebabkan kerawanan pangan. Misalnya, pada 2023, analisis menunjukkan bahwa kombinasi antara inflasi pangan tertinggi dalam 20 tahun (akibat reformasi ekonomi) (International Monetary Fund, 2023). Kemudian, banjir musiman yang menghancurkan 350.000 hektar lahan pertanian menciptakan “*perfect storm*” yang memperparah ketidakamanan pangan secara eksponensial (NiMet, 2024).

3.2.1.3 Monitoring Berdasarkan Inspection (Inspeksi)

Monitoring melalui inspeksi langsung merupakan elemen penting dalam pelaksanaan *Country Strategic Plan* (CSP) oleh World Food Programme (WFP) di Nigeria. Sistem ini dirancang untuk memverifikasi efektivitas program di lapangan dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada populasi yang mengalami kerawanan pangan akibat berbagai faktor. Selama periode 2020-2024,

sistem inspeksi ini mengalami perkembangan yang signifikan untuk menanggapi perubahan konteks dan kompleksitas krisis yang ada.

Post-Distribution Monitoring (PDM) diterapkan secara konsisten yang berguna sebagai alat utama dalam proses inspeksi untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan populasi target dan memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan (WFP, 2020). Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 mulai memperburuk kerawanan pangan, PDM difokuskan pada daerah-daerah yang terdampak konflik, seperti Borno, Adamawa, dan Yobe, di mana kombinasi antara konflik bersenjata dan pembatasan akibat COVID-19 menciptakan situasi darurat ganda. Hasil survei PDM tahun 2020 menunjukkan bahwa 78% penerima bantuan mengalami peningkatan signifikan dalam konsumsi pangan. Namun, survei ini juga mengidentifikasi tantangan akses di wilayah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata. Hal ini menunjukkan petani harus membayar "*taxation by bandits*" hingga 15-20% dari pendapatan mereka untuk dapat mengakses lahan pertanian (Opeyemi Adewale, 2024)

Evolusi sistem inspeksi pada tahun 2021 mencerminkan penyesuaian terhadap perubahan dalam modalitas bantuan, dimana PDM diarahkan pada program bantuan tunai yang disalurkan melalui sistem digital SCOPE. Ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan fleksibilitas dalam kondisi pembatasan mobilitas akibat COVID-19 (WFP, 2021). Inspeksi juga menunjukkan bahwa bantuan tunai memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi keluarga penerima dan meningkatkan daya beli di pasar desa, sekaligus mengurangi risiko penularan COVID-19. Pada tahun 2022, skala inspeksi ditingkatkan melalui

kerjasama dengan UNHCR dan mitra lokal untuk melakukan survei terhadap lebih dari 800 rumah tangga di wilayah perbatasan seperti Ogoja dan Kwande. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan mencapai 90% terhadap pendekatan berbasis tunai (World Food Programme, 2022a). Inspeksi ini juga mengungkapkan bahwa bantuan tunai membantu rumah tangga dalam mengatasi dampak inflasi pangan yang mencapai puncaknya pada tahun 2022 akibat krisis energi global dan perang Rusia-Ukraina .

Pada tahun 2023, *third-party monitoring* (TPM) digabungkan dengan PDM melalui kerjasama dengan mitra independen seperti *Fact Foundation* menjadi inovasi penting dalam sistem inspeksi. Ini memungkinkan WFP untuk memantau efektivitas program di daerah-daerah yang sulit dijangkau karena konflik atau kondisi keamanan yang tidak stabil (WFP, 2023a). TPM sangat penting dalam konteks Nigeria, di mana tingkat kekerasan bersenjata meningkat menjadi 25% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya (ACLED, 2024). Perkembangan terakhir dalam sistem inspeksi pada tahun 2024 mencakup survei baseline dan endline untuk menilai perubahan jangka menengah dalam konsumsi pangan, pengeluaran rumah tangga, dan status gizi anak-anak. Ini memberikan gambaran komprehensif tentang dampak program CSP terhadap ketahanan pangan jangka panjang Nigeria (WFP, 2024). Inspeksi ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan darurat berhasil mencegah kelaparan akut, tantangan struktural seperti degradasi lahan, konflik berkepanjangan, dan ketidakstabilan ekonomi masih memerlukan intervensi jangka panjang.

3.2.1.4 Monitoring Berdasarkan NGO Reports (Laporan LSM)

Pemantauan melalui laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan *Country Strategic Plan* oleh World Food Programme (WFP) di Nigeria, mengingat keterbatasan akses pemerintah dan organisasi internasional ke beberapa wilayah yang mengalami konflik atau ketidakstabilan keamanan. Lokal maupun internasional, berperan sebagai sumber informasi utama bagi WFP untuk mengawasi kondisi ketahanan pangan di level grassroots dan mengevaluasi keefektifan program yang dijalankan. Kolaborasi strategis antara WFP dan LSM mengalami pertumbuhan yang signifikan selama implementasi CSP, dari kerjasama yang terbatas pada tahun 2020, berkembang menjadi jaringan komprehensif yang mencakup 100 LSM pada tahun 2022, dimana 85% dari LSM tersebut merupakan organisasi nasional sebagai manifestasi komitmen terhadap agenda lokalisasi dan *sense of ownership* masyarakat terhadap program pembangunan (World Food Programme, 2022b). Strategi lokalisasi ini sangat relevan untuk konteks Nigeria, di mana pemahaman lokal tentang dinamika konflik, pola iklim, dan struktur sosial masyarakat menjadi faktor penentu kesuksesan program.

Action Against Hunger berperan sebagai mitra LSM utama yang menyediakan laporan rutin mengenai situasi ketahanan pangan di wilayah timur laut Nigeria, dengan data yang diintegrasikan oleh WFP bersama informasi dari Cadre Harmonisé dan *Integrated Phase Classification* (IPC) untuk memetakan area prioritas (WFP, 2020,). Laporan *Action Against Hunger* pada tahun 2020

memvalidasi temuan bahwa serangan Boko Haram terhadap petani di desa Koshibe, Borno, yang mengakibatkan 110 korban jiwa petani, berdampak pada penurunan signifikan produksi pangan dan peningkatan perpindahan penduduk internal. *Save the Children* juga memberikan laporan menyeluruh mengenai dampak krisis pangan terhadap anak-anak, yang menjadi landasan program "Gizi Ibu dan Anak", yang mana WFP yang berhasil menurunkan tingkat malnutrisi akut dari 12% menjadi 8% pada tahun 2023. Laporan ini juga mengonfirmasi dampak kesehatan mengenai lebih dari 2 juta anak balita membutuhkan penanganan malnutrisi akut berat pada tahun 2022 (UNICEF, 2023).

Pengembangan kapasitas untuk membangun resiliensi masyarakat. LSM yang memiliki basis agama seperti *Catholic Relief Services* dan *Islamic Relief Worldwide* juga memberikan akses khusus ke komunitas yang sulit dijangkau, terutama dalam konteks konflik horizontal antar komunitas dengan latar belakang agama yang berbeda (WFP, 2021). Laporan dari LSM berbasis agama ini menunjukkan bahwa program bantuan yang memperhatikan sensitivitas agama dan budaya memiliki tingkat akseptabilitas yang lebih baik dan memberikan dampak yang lebih sustainable.

Organisasi masyarakat sipil lokal seperti *Peace and Development Foundation* menyediakan laporan *real-time* tentang eskalasi konflik antara petani dan penggembala yang menyebabkan lebih dari 3.600 korban jiwa pada tahun 2021, informasi yang sangat vital bagi sistem peringatan dini WFP dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan bantuan kemanusiaan (International crisis group, 2021). *Network of NGOs Working with Internally Displaced Persons in Nigeria*

menyediakan data komprehensif tentang kondisi pengungsi internal yang mencapai 3,2 juta jiwa pada tahun 2023, termasuk analisis tentang strategi bertahan hidup darurat seperti mengurangi frekuensi makan dan menjual aset produktif yang telah dikonfirmasi dalam analisis dampak sosial sebelumnya (UNHCR, 2023).

3.2.2 Capacity Building and Problem Solving

Pengembangan kapasitas dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan *Country Strategic Plan* oleh World Food Programme (WFP) di Nigeria didesain untuk menangani akar permasalahan ketidakamanan pangan yang kompleks dan saling terkait. Strategi ini tidak terbatas pada penyediaan solusi darurat jangka pendek, namun juga memfokuskan pada pembangunan resiliensi jangka panjang melalui *Expert Advice, Rule Interpretation, Financial Assistance, and Technical Assistance* (Joachim 2007, 8-13).

3.2.2.1 Expert Advice (Saran Ahli)

Dalam hal ini, penyediaan konsultasi ahli merupakan elemen strategis dalam implementasi CSP yang bertujuan memperkuat kemampuan analitis dan pengambilan keputusan berbasis evidensi oleh pemerintah Nigeria dalam menghadapi berbagai faktor penyebab ketidakamanan pangan. WFP memanfaatkan keahlian teknis global dan pengalaman operasional di lebih dari 80 negara untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan berbasis bukti. WFP menyediakan rekomendasi kebijakan strategis kepada Kementerian Kesehatan Nigeria untuk memahami *supply chain* obat-obatan dan makanan bergizi dalam

konteks respons darurat, yang sangat relevan dengan kondisi krisis multidimensional yang dihadapi Nigeria (World Food Programme, 2022b). Keahlian ini meliputi analisis kerentanan rantai pasokan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19 dan konflik bersenjata yang telah terbukti mengganggu distribusi bantuan kesehatan dan gizi.

Saran ahli secara langsung merespons temuan bahwa malnutrisi akut berat pada anak-anak mencapai level tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir pada 2024. Melalui *Interim Country Strategic Plan (ICSP) 2019-2021* yang kemudian berkembang menjadi *CSP 2022-2025*, WFP memberikan saran strategis untuk memperkuat koherensi kebijakan *Zero Hunger*, khususnya yang terkait dengan perlindungan sosial dan pengakuan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional. Rekomendasi ini sangat relevan dengan kondisi Nigeria dimana 31,5 juta penduduk diperkirakan mengalami kerawanan pangan parah pada 2024 (World Food Programme, 2024b).

Bantuan teknis untuk pengembangan kebijakan dan kerangka kerja perlindungan sosial nasional mencakup strategi targeting populasi rentan yang menggunakan database digital *SCOPE* dan sistem manajemen transfer untuk mengidentifikasi karakteristik rumah tangga yang rentan serta melakukan fasilitas layanan sosial (WFP, 2020). Sistem ini sangat penting dalam konteks Nigeria dimana perpecahan sosial mencapai tingkat yang mengancam persatuan nasional. WFP juga memberikan saran strategis tentang integrasi program lintas sektor melalui *nexus kemanusiaan-pembangunan-perdamaian*, yang sangat relevan dengan kondisi Nigeria dimana konflik, kemiskinan, dan kerawanan pangan saling

memperkuat dalam lingkaran setan yang memerlukan pendekatan holistik (WFP, 2021). Keahlian ini mencakup pengembangan *early warning system* yang dapat memprediksi eskalasi konflik berdasarkan indikator kerawanan pangan dan perubahan iklim.

3.2.2.2 *Rule Interpretation (Interpretasi Aturan)*

Interpretasi aturan dalam implementasi CSP WFP di Nigeria bertujuan untuk memastikan bahwa semua program dan aktivitas sesuai dengan standar internasional bantuan kemanusiaan sambil tetap adaptif terhadap konteks lokal yang unik. Komponen ini sangat penting mengingat kompleksitas operasional di Nigeria yang melibatkan berbagai stakeholder, kondisi keamanan yang beragam, dan kebutuhan untuk menjaga netralitas dalam lingkungan konflik. WFP mengembangkan *Standard Operating Procedures (SOP)* yang mengadaptasi pedoman global dengan konteks spesifik Nigeria, termasuk protokol keamanan untuk operasi di wilayah konflik, prosedur targeting yang sensitif terhadap dinamika sosial lokal, dan mekanisme akuntabilitas yang melibatkan komunitas (WFP, 2021). SOP ini secara khusus merespons tantangan operasional, termasuk akses yang terbatas ke wilayah konflik dimana 4.777 insiden penculikan terjadi pada 2022 (International Crisis Group, 2022).

Sistem SCOPE yang digunakan WFP mengikuti protokol ketat untuk identifikasi penerima manfaat dan pencegahan duplikasi, dengan mekanisme *biometric enrollment* dan geotagging untuk memvalidasi lokasi distribusi (WFP, 2020). Protokol ini dikembangkan untuk mengatasi tantangan dalam konteks

Nigeria dimana perpindahan populasi yang masif akibat konflik dan bencana alam menyulitkan identifikasi dan pelacakan penerima manfaat. Interpretasi aturan juga mencakup pengembangan protokol *Cash-Based Transfer* (CBT) yang mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal, tingkat inflasi, dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan (World Bank and National Bureau of Statistics, 2020). Protokol CBT ini disesuaikan dengan kondisi dimana inflasi pangan mencapai tingkat tertinggi dalam 20 tahun pada 2023 akibat penghapusan subsidi bahan bakar dan depresiasi Naira (International Monetary Fund, 2023). WFP juga mengembangkan interpretasi khusus tentang prinsip "*Do Not Harm*" dalam konteks Nigeria yang mengalami konflik horizontal antara kelompok berbeda, dengan protokol yang memastikan bahwa bantuan tidak memperparah ketegangan sosial atau menciptakan ketergantungan yang kontraproduktif. Pengembangan protokol cluster coordination mengikuti *standar Inter-Agency Standing Committee* (IASC) yang diadaptasi dengan struktur koordinasi kemanusiaan Nigeria (World Food Programme, 2023a).

3.2.2.3 *Financial Assistance (Bantuan Keuangan)*

Bantuan keuangan WFP dalam implementasi *Country Strategic Plan* (CSP) di Nigeria disusun sebagai instrumen responsif yang tidak hanya menangani kebutuhan darurat, tetapi juga membangun ketahanan pangan jangka panjang. Skema alokasi dana dikembangkan secara progresif untuk menjawab eskalasi krisis, baik yang disebabkan oleh konflik, ketidakstabilan ekonomi, maupun bencana alam. Dengan demikian, bantuan keuangan menjadi mekanisme adaptif

yang memastikan keberlanjutan program sekaligus menjangkau populasi yang paling (WFP, 2024). Pendekatan ini menekankan integrasi antara bantuan segera untuk mengurangi kelaparan dan program pembangunan kapasitas yang memperkuat ketahanan sistem pangan nasional. Artinya, setiap alokasi dana diarahkan agar tidak hanya berfungsi sebagai intervensi sementara, melainkan juga sebagai investasi sosial-ekonomi jangka panjang (World Food Programme, 2022b).

Salah satu terobosan utama adalah penggunaan *Cash-Based Transfers* (CBT), yakni penyaluran bantuan keuangan langsung kepada penerima manfaat. Skema ini memberikan fleksibilitas bagi rumah tangga dalam menentukan prioritas kebutuhan pangan mereka, sekaligus mendukung pasar lokal melalui peningkatan daya beli masyarakat. Penyesuaian nilai transfer dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan inflasi dan fluktuasi harga, sehingga tetap relevan dengan tantangan ekonomi yang dinamis. Lalu, Inovasi teknologi mobile money memperluas efektivitas program ini. Dengan sistem digital, dana bantuan dapat disalurkan secara cepat, aman, dan menjangkau wilayah terpencil. Selain mengurangi risiko penularan penyakit di masa pandemi, penggunaan *mobile money* juga memperkuat perputaran ekonomi desa, sehingga efek bantuan keuangan tidak hanya berhenti di tingkat rumah tangga, melainkan juga menghidupkan aktivitas pasar lokal (WFP, 2021).

Selain CBT, bantuan keuangan juga dialokasikan untuk penyediaan pangan dalam bentuk bubuk fortifikasi. Produk bubuk ini diformulasikan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-

anak, ibu hamil, dan lansia. Dana digunakan untuk pengadaan, distribusi, serta pengembangan rantai pasok yang memastikan kualitas bubuk tetap terjaga hingga ke titik distribusi terakhir. Strategi ini memperlihatkan bahwa bantuan keuangan tidak hanya berfokus pada kuantitas pangan, tetapi juga kualitas gizi yang diterima (World Food Programme, 2022b). Melalui pendekatan ini, bantuan keuangan berperan penting dalam menurunkan prevalensi malnutrisi, sekaligus menjadi instrumen kebijakan kesehatan masyarakat yang terintegrasi dengan program pangan nasional (WFP, 2023a)

Kemudian bentuk lain dari bantuan keuangan diarahkan pada pembangunan infrastruktur pendukung sistem pangan. Investasi mencakup pembangunan gudang penyimpanan pangan yang lebih *modern*, peningkatan akses jalan untuk memperlancar distribusi logistik, serta sistem irigasi guna mendukung ketahanan pertanian. Selain itu, dana juga digunakan untuk mengembangkan platform digital peringatan dini agar respons terhadap bencana lebih cepat dan efisien. Dengan begitu, intervensi finansial WFP tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga mengurangi kerentanan struktural (World Food Programme, 2022b).

3.2.2.4 Technical Assistance (Bantuan Teknis)

Bantuan teknis WFP dalam implementasi CSP di Nigeria dirancang untuk membangun kapasitas jangka panjang dan transfer teknologi yang dapat mengatasi akar penyebab kerawanan pangan struktural. Pendekatan ini berkembang dari bantuan teknis konvensional menjadi ecosystem inovasi yang mengintegrasikan teknologi digital, praktik pertanian berkelanjutan, dan sistem early warning yang

sophisticated. Bantuan teknis kepada *National Emergency Management Agency* (NEMA) dan *State Emergency Management Agencies* (SEMA) merepresentasikan investasi strategis dalam penguatan kapasitas nasional untuk manajemen bencana dan tanggap darurat. Program pelatihan komprehensif untuk 500 lebih pejabat pemerintah mencakup manajemen logistik tingkat lanjut, sistem distribusi yang ditargetkan, protokol tanggap darurat, dan perencanaan berbasis bukti (WFP, 2021).

Program "*Digital Farmers*" yang melibatkan 10.000 petani merupakan inovasi terobosan dalam bantuan teknis yang menggunakan platform SMS dan aplikasi seluler untuk memberikan akses *real-time* ke data harga pasar, informasi meteorologi, dan praktik pertanian terbaik (WFP, 2023b). Program ini menunjukkan peningkatan rata-rata hasil panen sebesar 30% di kalangan petani. Program *Sustainable Agriculture and Resilience Building* yang menjangkau 5.000 lebih petani kecil berkembang menjadi *ecosystem* pemberdayaan komunitas yang komprehensif, dengan fokus pada pelatihan praktik pertanian berkelanjutan, penyediaan input berkualitas, dan pembangunan infrastruktur pertanian. Program ini menghasilkan pengurangan kerugian pascapanen hingga 40% dan peningkatan akses pasar bagi petani lokal (World Food Programme, 2022b).

Bantuan teknis melalui WFP *Innovation Accelerator* merupakan komponen *cutting-edge* yang menghubungkan *ecosystem* inovasi global dengan kebutuhan lokal Nigeria, dengan fokus pada solusi teknologi untuk mengatasi kelaparan dan malnutrisi (World Food Programme, 2022b). Akselerator telah mendukung lebih dari 125 proyek dengan 22 inovasi yang *discale-up* secara global, menjangkau 37

juta orang di 88 negara pada 2022. Sistem *Data for Decision Making* (D4D) berbasis artificial intelligence merepresentasikan puncak evolusi bantuan teknis WFP, menggunakan *machine learning* untuk menganalisis big data dari berbagai sumber termasuk *satellite imagery, weather data, market prices, dan population movement patterns* untuk memprediksi food insecurity risks hingga tiga bulan sebelumnya (World Food Programme, 2024b). Transfer teknologi *blockchain* untuk supply chain management dan smart contracts untuk cash transfer menunjukkan komitmen WFP terhadap innovation frontier yang dapat meningkatkan *transparency, efficiency, dan accountability* dalam bantuan kemanusiaan (World Food Programme, 2023b).

3.3 Penilaian dari Organisasi Lain dan Lembaga Penelitian

Dalam laporan GRFC (Global Report on Food Crises) tahun 20204 menegaskan bahwa WFP berhasil dalam memberikan bantuan penyelamat jiwa, terutama di wilayah konflik timur laut Nigeria. Tanpa intervensi WFP, jumlah orang yang menghadapi krisis pangan akut akan jauh lebih besar, bahkan berpotensi menjadi bencana kemanusiaan yang meluas. Artinya, dari sisi respon kemanusiaan darurat, kinerja WFP dinilai sangat baik dan krusial. Namun, laporan GRFC juga menyampaikan bahwa upaya WFP belum cukup untuk menjawab skala krisis di Nigeria. Hal ini bukan karena kegagalan WFP, melainkan karena magnitude masalah yang terlalu besar untuk ditangani hanya dengan bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, GRFC menekankan perlunya solusi jangka panjang, misalnya integrasi perdamaian, pemulihan ekonomi, dan adaptasi iklim dengan dukungan

lebih kuat dari pemerintah Nigeria dan komunitas internasional (FSIN and Global Network Against Food Crises, 2024)

Kemudian, United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam laporannya tahun 2023 memberikan penilaian positif terhadap keberhasilan program "Gizi Ibu dan Anak" WFP dalam menurunkan tingkat malnutrisi akut di beberapa wilayah Nigeria, dengan hasil konkret berupa penurunan tingkat malnutrisi akut dari 12% menjadi 8% pada 2023. UNICEF mengapresiasi pendekatan kolaboratif WFP dengan Kementerian Kesehatan Nigeria dan LSM lokal dalam memperkuat sistem layanan kesehatan primer, yang menunjukkan integrasi efektif antara intervensi kemanusiaan dengan penguatan sistem kesehatan (UNICEF, 2023)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi *Country Strategic Plan* (CSP) WFP di Nigeria pada periode 2020–2024 merupakan respon komprehensif terhadap krisis pangan yang diperburuk oleh pandemi COVID-19 dan situasi pascapandemi. WFP tidak hanya berperan sebagai penyedia bantuan darurat melalui *Cash-Based Transfers* (CBT), distribusi pangan, dan inovasi *mobile money*, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ketahanan jangka panjang melalui investasi infrastruktur, pengembangan sistem irigasi, serta penguatan kapasitas pemerintah dan petani lokal melalui program pelatihan. Inovasi teknologi berbasis *Data for Decision (D4D)* menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kemampuan *early warning system*, yang pada gilirannya mempercepat respons pemerintah dari hitungan minggu menjadi hari. Upaya ini terbukti membawa dampak positif dalam menekan risiko kelaparan, memperbaiki akses gizi, meningkatkan angka partisipasi sekolah melalui program makan anak, dan menguatkan perputaran ekonomi lokal di tengah krisis.

Dalam kerangka teoritis, penelitian ini memanfaatkan teori ketahanan pangan untuk menjelaskan dinamika akses, ketersediaan, dan stabilitas pangan; teori pembangunan berkelanjutan untuk menilai keberlanjutan intervensi jangka panjang; serta konsep bantuan kemanusiaan berbasis resiliensi untuk menganalisis bagaimana WFP mendorong adaptasi masyarakat dan institusi lokal terhadap guncangan krisis. Analisis teori ini memperlihatkan bahwa efektivitas intervensi

tidak hanya dapat diukur dari kecepatan distribusi bantuan, tetapi juga dari kemampuan program membangun kapasitas adaptif dan kemandirian sistem pangan di Nigeria.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya, tekanan inflasi, lemahnya infrastruktur, serta faktor eksternal seperti konflik bersenjata dan perubahan iklim, menjadi hambatan serius dalam memastikan efektivitas program WFP. Oleh karena itu, kontribusi WFP dapat dinilai signifikan dalam menyelamatkan jutaan jiwa dari kelaparan, tetapi keberlanjutan dan efektivitas jangka panjangnya hanya dapat dicapai apabila ada sinergi lebih erat dengan pemerintah Nigeria, organisasi internasional, serta LSM lokal. Dengan memperkuat transfer teknologi, fasilitasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan integrasi antara bantuan jangka pendek dengan pembangunan kapasitas jangka panjang, WFP dapat bergerak dari sekadar penyedia bantuan darurat menuju katalisator sistem pangan nasional yang lebih inklusif, tangguh, dan berdaya tahan terhadap krisis di masa depan.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini telah menguraikan peran World Food Programme (WFP) dalam implementasi *Country Strategic Plan* (CSP) di Nigeria pada periode 2020–2024, namun masih terdapat ruang pengembangan bagi penelitian lanjutan. Penulis selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan menggunakan pendekatan komparatif antarnegara, sehingga dapat dilihat perbedaan efektivitas program WFP dalam konteks krisis yang bervariasi. Selain itu, penelitian lanjutan

juga perlu menggali lebih dalam perspektif penerima manfaat secara langsung, misalnya melalui metode survei atau wawancara, agar dampak sosial-ekonomi dari bantuan WFP dapat tergambar lebih holistik. Dari sisi teori, penulis berikutnya dapat memperkaya kerangka analisis dengan memasukkan teori tata kelola global, teori ketergantungan, atau pendekatan ekonomi politik internasional, sehingga dinamika intervensi WFP dapat dipahami tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari dimensi politik, ekonomi, dan kedaulatan pangan.

Lebih jauh, penelitian di masa depan dapat mengintegrasikan data kuantitatif yang lebih rinci, seperti indikator gizi, tingkat ketahanan pangan rumah tangga, serta data inflasi dan distribusi bantuan, untuk memperkuat validitas temuan. Studi lanjutan juga disarankan menelaah secara khusus peran teknologi digital, seperti sistem *Data for Decision (D4D)*, dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pangan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Akhirnya, penting bagi penulis berikutnya untuk menilai kontribusi aktor lokal, baik pemerintah daerah maupun LSM, dalam memperkuat keberlanjutan program, sehingga dapat dirumuskan strategi kolaboratif yang lebih komprehensif antara WFP, pemerintah, dan komunitas lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Jutta Joachim, & Bob Reinalda and Bertjan Verbeek. (2007). *International Organizations and Implementation* (1st Edition). <https://doi.org/10.4324/9780203936184>.
- John W. Creswell, J. David Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*" (fifth ed). SAGE Publications, inc.

Artikel Jurnal:

- Chinedum Nwajiuba. (2005). Nigeria's Agriculture and Food Security Challenges. *Food Security*.
- Dr Kwode E. Israel & Gad Charity. (2024). Food Inflation and the Nigerian Economy: An Empirical Investigation. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)*, VIII(XI). <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2024.8110266>
- Eze Jude Obinna Ph.D, A. E. C. Ph. D., Okolie Jonathan Ibekwe Ph. D, Udeh Ifeyinwa Ebere Ph. D, Onyeka-Udeh Virginia Ph. D, Nwankwo Peter Emeka Ph. D, Anukwe Grace Ijeoma Ph. D. (2024). Effect of Inflation on Macroeconomics in Contemporary Nigeria: A Case Study of Financial Markets. *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 6(11).
- Idris Mohammed. (2024, October 28). *The New Humanitarian | Nigeria's malnutrition crisis reveals the extent of its healthcare collapse*. <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2024/10/28/nigeria-malnutrition-crisis-reveals-extent-healthcare-collapse>
- Jamiu, M. S., Ishola, H. S., & Towoju, A. J. (2024). Ungoverned Spaces and Human Security Challenges: A Re-emerging Threat on Nigeria's National Security. *African Journal of Politics and Administrative Studies*, 17 (2), 739–754.
- Jung, I. (2023). Food Insecurity in Nigeria: Food Supply Matters: Nigeria. *Selected Issues Papers, 2023*.
- Macroeconomics in Contemporary Nigeria: A Case Study of Financial Markets. *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 6(11).
- Mekonnen, D. A., Akerele, D., Achterbosch, T., de Lange, T., & Talsma, E. F. (2021). Affordability of Healthy and Sustainable Diets in Nigeria. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 5. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.726773>.
- Nweke, C. C., Obi, C. B., & Igweike, O. J. (2022). Russia-Ukraine War, its Impacts on Food Security in Africa. *Global Journal of Social Sciences Studies*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.55284/gjss.v8i2.804>.
- Onuoha, Peter Chuks and Emmanuel Chinedu Macalex-Achinulo PhD. (2023). National Social Investment Programme and Poverty Alleviation in Nigeria,

- 2016-2023. *South-South Journal of Humanities and International Studies*, Vol 6 No 3.
- Opeyemi Adewale. (2024). *Illegal Roadblocks, Terrorism and a Shadow Economy: Unveiling the Fractured State Narrative In Nigeria*. <https://www.securityincontext.com/posts/illegal-roadblocks-terrorism-and-a-shadow-economy-unveiling-the-fractured-state-narrative-in-nigeria?>.
- Ritchie, H., Rosado, P., & Roser, M. (2023). Hunger and Undernourishment. *Our World in Data*. <https://ourworldindata.org/hunger-and-undernourishment>.
- Rizky Anggia Putri, Falhan Hakiki. (2022). PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) TERHADAP KERAWANAN PANGAN DI NAMIBIA. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7 No 1. <http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.15>.
- Shikfu Shimang. (2023). Cash Transfers to Poor and Vulnerable Households in Nigeria: A Critical Analysis of the Gender Mainstreaming Approach. *Journal of Contemporary International Relations and Diplomacy*, 4((1)), 687–709. <https://doi.org/10.53982/jcird.2023.0401.04-j>
- Swastutiputri, A. D., & Muslikhati, S. (2018). *PERAN FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN DI NIGERIA TAHUN 2016-2018*.
- Syailendra Putra, M. R., Fadloli, M., Najla, T. A., & Anastasya, V. (2024). Peran Liputan Media Terhadap World Food Programme Dalam Menangani Krisis Pangan yang Terjadi di Suriah. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1304–1311. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3083>.

Laporan:

- ACLED. (2024a). ACLED Conflict Index: Global conflicts double over the past five years. *ACLED*. <https://acleddata.com/conflict-index/>
- ACLED, C. (2024b, December 6). Nigeria: 2024 Conflict Index Infographic. *ACLED*. <https://acleddata.com/2024/12/06/nigeria-2024-conflict-index-infographic/>
- African Development Bank. (2022). *NIGERIA - COUNTRY STRATEGY PAPER 2020-2024*.
- Cadre Harmonise. (2022). *Final Fiche Report for November 2022: Cadre Harmonisé Result for Identification of Risk Areas and Vulnerable Populations in Twenty (26) Nigerian States and the Federal Capital Territory (FCT) of Nigeria | Food Security Cluster*. <https://fscluster.org/nigeria/document/final-fiche-report-november-2022-cadre>
- CARE International. (2023, August 31). *Nigeria's State emergency declaration on food security: A policy brief | CARE International*. <https://www.care-international.org/resources/nigerias-state-emergency-declaration-food-security-policy-brief>
- CBN, C. B. of N. (2021). *Annual Economic Report 2021* [Abuja: Central Bank of Nigeria].

- FAO. (2021). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2021: Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all*.
- Federal Ministry of Agriculture. (2021). *Annual Agricultural Performance Survey 2021*. Federal Ministry of Agriculture.
- FEWS NET. (2020, December 31). *Nigeria Food Security Outlook Update, December 2020—Nigeria* | ReliefWeb. <https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-food-security-outlook-update-december-2020>.
- FEWS NET. (2024, July 9). *Nigeria Food Security Outlook, June 2024—January 2025—Nigeria* | ReliefWeb. <https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-food-security-outlook-june-2024-january-2025>.
- Food and Agriculture Organization and Cadre Harmonisé. (2021). *Cadre Harmonisé Results for Nigeria 2021*.
- Food Security Information Network and Global Report on Food Crises. (2022). *Global Report on Food Crises 2022* (p. 27).
- Food Security Information Network and Global Report on Food Crises. (2022). *Global Report on Food Crises 2022* (p. 27).
- Food Security Information Network and Global Report on Food Crises. (2024). *Global Report on Food Crises 2023-2024 Nigeria*.
- FSIN and Global Network Against Food Crises. (2024). *2024 GLOBAL REPORT ON FOOD CRISES JOINT ANALYSIS FOR BETTER DECISIONS*.
- Food Security Information Network (FSIN) and Global Report on Food Crises (GRFC). (2022). *Global Report on Food Crises 2022* (p. 27).
- Food Security Information Network (FSIN) and Global Report on Food Crises (GRFC). (2024). *Global Report on Food Crises 2023-2024 Nigeria*.
- Food Security Information Network and Global Report on Food Crises. (2024).
- FSIN. (2020). *2020 Global Report on Food Crises*.
- IFPRI. (2024). *About IFPRI | IFPRI : International Food Policy Research Institute*. <https://www.ifpri.org/about>.
- IMF. (2023). *Nigeria: Economic development and outlook* (No. 23/124). International Monetary Fund Country Report.
- International crisis group. (2021). *Ending Nigeria's Herder-Farmer Crisis: The Livestock Reform Plan* | International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/302-ending-nigerias-herder-farmer-crisis-livestock-reform-plan>.
- International Crisis Group. (2022, August 29). *Crisis Group*. <https://www.crisisgroup.org/fr>.
- International Labour Organization. (2020). *World Employment and Social Outlook Trends 2020*. International Labour Organization 2020.
- International Monetary Fund. (2020). *Nigeria: 2020 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Alternate Executive Director for Nigeria*. IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/05/Nigeria-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-50064>.

- International Monetary Fund. (2023). *Nigeria: 2022 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Nigeria*. IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/02/16/Nigeria-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-529842>.
- IOM. (2024). *Nigeria: Displacement Tracking Matrix (DTM) Emergency Tracking Tool (ETT) - Summary of Movements in Borno and Adamawa States, Dashboard: 405 (4 - 10 November 2024) - Nigeria | ReliefWeb*. <https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-displacement-tracking-matrix-dtm-emergency-tracking-tool-ett-summary-movements-borno-and-adamawa-states-dashboard-405-4-10-november-2024>.
- NBS. (2021). *Reports | National Bureau of Statistics*. <https://www.nigerianstat.gov.ng/elibrary/read/1241113>.
- NBS. (2024). *Reports | National Bureau of Statistics*. <https://www.nigerianstat.gov.ng/elibrary/read/1241453>.
- NIHSA. (2023). *Annual Flood Outlook 2023*. Nigerian Hydrological Services Agency.
- NiMet. (2020). *Full Report—2020 Seasonal Rainfall Prediction (January 2020)—Nigerian Meteorological Agency (NiMeT) | Food Security Cluster*. https://fscluster.org/ar/ne_nigeria/document/full-report-2020-seasonal-rainfall
- NiMet. (2024). *2024 State of the Climate in Nigeria*.
- OCHA. (2022, December 14). *Nigeria - Floods Response: Flash Update 4 (Last Updated: 14 December 2022) - Nigeria | ReliefWeb*. <https://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-floods-response-flash-update-4-last-updated-14-december-2022>.
- Summit, W. F. (1996). *Rome Declaration on World Food Security*.
- UNHCR. (2020). *Nigeria—2020 year-end report—Issues and Challenges*. Global Focus. <https://reporting.unhcr.org/nigeria-2020-year-end-report-issues-and-challenges>
- UNHCR. (2023). *Annual Results Report 2023 Nigeria*.
- UNHCR. (2025). *Nigeria Multi-year Strategy 2023 – 2025*.
- UNICEF. (2023). *25 million Nigerians at high risk of food insecurity in 2023*. <https://www.unicef.org/press-releases/25-million-nigerians-high-risk-food-insecurity-2023>.
- UNICEF. (2023a). *Nutrition | UNICEF Nigeria*. <https://www.unicef.org/nigeria/nutrition>.
- UNICEF. (2023b, September 28). *First 1,000 Days Formative Study Report | UNICEF Nigeria*. <https://www.unicef.org/nigeria/reports/first-1000-days-formative-study-report>.
- United Nations. (1961). *General Assembly, 16th Session, 1084th Plenary Meeting: A/RES/1714 (XVI)*. <https://docs.un.org/en/A/RES/1714%28XVI%29>
- USDA. (2023). *USDA ERS - Definitions of Food Security*. <https://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-u-s/definitions-of-food-security/>.

- WFP (Ed.). (2020). *Annual Country Report 2020: Nigeria. Country Strategic Plan 2019-2022*. World Food Programme. <https://wfp.tind.io/record/127859>.
- WFP Annual Report. (2020). *Annual Country Report | World Food Programme*. https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=NG01&year=2020#/21303.
- WFP. (2021). *Nigeria Annual Country Report 2021 Country Strategic Plan 2019—2022*. World Food Programme.
- WFP. (2021a). *Annual Country Report | World Food Programme*. https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=NG01&year=2021#/22918.
- WFP. (2021b). *Annual Country Reports—Nigeria | World Food Programme*. <https://www.wfp.org/publications/annual-country-reports-nigeria>.
- WFP. (2022). *Nigeria food security assessment: Crisis deepening*. World Food Programme.
- WFP Nigeria. (2023, November 29). *WFP Nigeria: Situation Report #76 - October 2023 - Nigeria | ReliefWeb*. <https://reliefweb.int/report/nigeria/wfp-nigeria-situation-report-76-october-2023>.
- WFP. (2023a). *Annual Country Report | World Food Programme*. https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=NG02&year=2023.
- WFP. (2023b). *Digital Farmers Program: Implementation Report 2022-2023*. World Food Programme Nigeria.
- WFP. (2024, April 4). *WFP at a Glance | World Food Programme*. <https://www.wfp.org/stories/wfp-glance>.
- WFP. (2024a). *33.1 million Nigerians projected to be food insecure in 2025 | FAO in Nigeria | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture*. <https://www.fao.org/nigeria/news/detail-events/fr/c/1720792/>.
- WFP. (2024b). *Nigeria Annual Country Report 2024 Country Strategic Plan 2023—2027* (pp. 20–25). World Food Programme.
- WFP. (2024c, April 12). *Worsening hunger grips West and Central Africa amid persistent conflict and economic turmoil | World Food Programme*. <https://www.wfp.org/news/worsening-hunger-grips-west-and-central-africa-amid-persistent-conflict-and-economic-turmoil>.
- World Bank and National Bureau of Statistics (NBS). (2020). *COVID-19 Impact Monitoring Survey 2020*. Abuja: World Bank Group.
- World Bank Group. (2020). *Rising to the Challenge: Nigeria's COVID Response*. World Bank.
- World Economic Forum. (2020). *Annual Report 2021-2022*.
- WORLD FOOD PROGRAMME. (2000). *GENERAL REGULATIONS GENERAL RULES FINANCIAL REGULATIONS RULES OF PROCEDURE OF THE EXECUTIVE BOARD*.
- World Food Programme. (2022a). *Annual Country Report | World Food Programme*. https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=NG01&year=2022.

- World Food Programme. (2022b). *WFP Northeast Nigeria External Situation Report, September 2022*. World Food Programme. <https://www.wfp.org/publications/nigeria>.
- World Food Programme. (2023). *WFP Nigeria External Situation Report, July 2023*. World Food Programme Nigeria. <https://www.wfp.org/publications/nigeria>.
- World Food Programme Nigeria. (2024). *Nigeria | World Food Programme*.
- World Food Programme. (2024). *Nigeria Annual Country Report 2024 Country Strategic Plan 2023—2027*. World Food Programme.
- World Food Programme. (2023c). *WFP Nigeria External Situation Report, July 2023*. World Food Programme Nigeria. <https://www.wfp.org/publications/nigeria>
- World Food Programme. (2024a). *Compendium of Policies relating to the Strategic Plan (WFP/EB.A/2024/4-A/1/Rev.1), Executive Board, 2024*. World Food Programme. https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000161581
- World Food Programme. (2025). *Who we are | World Food Programme*. <https://www.wfp.org/who-we-are>.

Berita:

- Adeoye, A. (2024, March 13). Nigeria hit by wave of food looting as economic crisis deepens. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/8a69bc80-fa5a-4beb-8989-fbd04d2330ac>.
- Akombi-Inyang, B. (2021, July 22). *Malnutrition among children is rife in Nigeria. What must be done*. The Conversation. <http://theconversation.com/malnutrition-among-children-is-rife-in-nigeria-what-must-be-done-164496>
- Idris Mohammed. (2024, October 28). *The New Humanitarian | Nigeria's malnutrition crisis reveals the extent of its healthcare collapse*. <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2024/10/28/nigeria-malnutrition-crisis-reveals-extent-healthcare-collapse>
- Mohammed Momoh. (2023, May 4). *Severe malnutrition in Nigeria's northeast Borno alarms MSF, WFP*. The EastAfrican. <https://www.theeastafrican.co.ke/tea/sustainability/malnutrition-in-nigeria-northeast-worries-global-bodies-4222956>.
- [AP NEWS. \(2023\). Militants kill 11 farmers in Nigeria's north, raising fresh concerns about food supplies | AP News. https://apnews.com/article/boko-haram-borno-farmers-northeast-fooda9a719ed7e39b0e38ba26ece091fca1d](https://apnews.com/article/boko-haram-borno-farmers-northeast-fooda9a719ed7e39b0e38ba26ece091fca1d)